KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK MENURUT SITI MUSDAH MULIA

Skripsi :

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

Eka RatnaSari

NIM: E01213017

JURUSAN AQIDAH FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA 2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Eka RatnaSari
NIM	: E01213017
Jurusan	: Aqidah Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
0CBA3AEF458153848
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Eka RatnaSari

E01213017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas nama Eka RatnaSari/ NIM E01213017 dengan judul " Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia" Telah dipertahankan di depan penguji Skripsi.

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2017

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Muhid., M.Ag.

NIP. 196310021993031004

Penguji I,

Dr. Rofhani, M.Ag

NIP. 197101301997032001

Sekertaris,

Fikri Mahzumi, S.Hum, M,Fil.I

NIP. 198204152015031001

Penguji II

Abdul Kadir Riyadi, Ph.D

NIP. 197008132005011003

Penguji III

Drs. Tasmuji, M.Ag

196209271992031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa skripsi ini :

Judul Skripsi : " Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia".

Nama Penulis : Eka RatnaSari

NIM : E01213017

Telah memenuhi kelengkapan dan telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 17 Juli 2017

Dosen Pembimbing

Dr. Rofhani, M.Ag
NIP. 197101301997032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eka RatnaSari
NIM : E01213017.
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Aqidah Filsafat Islam.
E-mail address : eccao14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2017.

Penulis

(Eka RatnaSari)
nama terang dan tanda tangan

KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK MENURUT SITI MUSDAH MULIA

Eka RatnaSari (E01213017)

ABSTRAK

Fenomena kepemimpinan perempuan akhir-akhir ini menjadi sebuah topik yang banyak dibicarakan, eksistensi perempuan dalam berpolitik banyak menimbulkan wacana, mulai dari pendapat yang menyetujui, dan wacana yang tidak menyetujui perempuan menjadi seorang pemimpin dan melakukan kegiatan politik. Salah satu tokoh, yang menyetujui perempuan menjadi pemimpin dan melakukan kegiatan politik adalah Siti Musdah Mulia, yang dalam hal ini sebagai narasumber untuk penelitian ini. Sedangkan kelompok yang tidak menyetujui perempuan sebagai pemimpin dan melakukan kegiatan politik adalah ulama salaf fuqoha' seperti salah satunya Syaikh Abdul Aziz. Kepemimpian perempuan menurut Musdah Mulia adalah ketika seorang pejabat perempuan melaksanakan agenda kerjanya untuk mensejahterakan masyarakat, bukan menyejahterakan diri sendiri. Berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh Musdah Mulia ketika ikut serta dalam kegiatan perpolitikan, ketika perempuan menjadi seorang pejabat maka tugas agendanya lebih menyentuh secara langsung ke lapisan masyarakat, karena seorang perempuan dengan sifat feminimnya yang mengasihi, menyanyangi, dan sikap mensejahterakan orang lain akan diaplikasikan kepada masyarakatnya. Sikap perpolitikan yang syarat dengan sifat maskulinitas, seperti tegas, keras, dan menjatuhkan, sebaiknya dikombinasikan dengan sikap feminimtas, untuk menjadikan kegiatan politik yang mengabdi, mensejahterkan masyarakat. Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teknik penelitian lapangan. Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa perempuan mempunyai hak untuk ikut serta dalam membangun negaranya, yang dalam hal ini menjadi seorang pemimpin dalam kegiatan politik. Ketika perempuan menjadi seorang pejabat maka, perempuan tersebut benar-benar mendedikasikan kemampuannya untuk mensejahterakan masyarakat, seperti perumpamaan seorang ibu yang mengasuh anaknya.

Kata Kunci: Perempuan, Kepemimpinan, Politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Abstrak..... iii

Kata Pengantar..... ix

Daftar Isi..... xi

BAB I: Pendahuluan..... 1

A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 12
C. Tujuan..... 13
D. Penegasan Judul..... 13
E. Kajian Pustaka..... 14
F. Metode Penelitian..... 15
1. Jenis penelitian..... 15
2. Teknik Pengumpulan Data..... 16
a. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder..... 16
b. Wawancara..... 17
3. Teknis Analisis Data..... 17
a. Analisis Historis..... 17
b. Analisis Deskriptif..... 18
G. Sistematika pembahasan..... 18

BAB II: Biografi Siti Musdah Mulia..... 20

A. Mengenai Siti Musdah Mulia..... 20
B. Riwayat Pendidkan..... 21
C. Karya-karya Siti Musda Mulia..... 23
D. Tokoh Yang Mempengaruhi Siti Musdah Mulia..... 25
1. Muhammad Husain Haikal..... 27
a. Biografi Muhammad Husain Haikal..... 27
b. Corak dan Metode Berfikir Husain Haikal..... 28
2. Munawir Sjadzali..... 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Biogarafi Munawir Sjadzali..... 30
b. Corak dan Metode Berfikir Munawir Sjadzali..... 32
3. Quraish Shihab..... 32
a. Biografi Quraish Shihab..... 32
b. Corak dan Metode Berfikir Quraish Shihab..... 34

BAB III: Konsep Perempuan Dalam Berbagai Peran..... 36

A. Konsep perempuan dan Kepemimpinan perempuan..... 36
1. Konsep Feminisme..... 36
2. Konsep Kepemimpinan Perempuan..... 41

B. Perempuan Dalam Berbagai Peran..... 50
1. Peran Perempuan Sebagai masyarakat..... 50
2. Peran Perempuan Sebagai Anggota Keluarga..... 51
3. Peran Perempuan Sebagai Tenaga Kerja..... 53
4. Peran perempuan sebagai Warga Negara..... 55

BAB IV: Konsep Kepemimpinan Perempuan Menurut

Siti Musdah Mulia..... 58

A. Konsep Kepemimpipinan Perempuan Menurut
Siti Musdah Mulia..... 58
B. Perempuan Dalam Politik Menurut Siti Musdah Mulia..... 68
C. Realitas Peran Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia..... 76

BAB V: PENUTUP..... 83

A. Kesimpulan..... 83
B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA..... 86

Lampiran..... 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena akhir-akhir ini di Indonesia banyak nama pejabat perempuan yang muncul dengan berbagai masalah maupun prestasi-prestasi yang dilakukan oleh mereka. Seperti menteri kelautan Susi Pudjiastuti yang ramai dibicarakan oleh media mengenai tato yang ada di kakinya,[1] mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari yang ditangkap oleh KPK karena dituduh korupsi hasil kegiatan pengadaan alat kesehatan.[2] Tidak hanya masalah-masalah krusial seperti yang diberitakan mengenai pejabat perempuan namun juga ada beberapa prestasi yang dilakukan oleh pejabat perempuan seperti yang di lakukan oleh Tri Rismaharini wali kota Surabaya yaitu diantaranya turun langsung dalam memperbaiki ruang hijau dan terbuka di Surabaya.[3]

Dengan beredarnya berita-berita dari media mengenai perilaku pejabat perempuan dan banyaknya wacana yang ada di al-Qur'an mulai dari pendapat yang tidak menyetujui atau wacana yang menyetujui seorang perempuan memimpin baik dari skala kecil maupun skala besar seperti negara.

---

[1]Anindya Legia Putri, *Kata Ahmad Dhani Soal Tato dan Rokok Menteri Susi*, Tempo, No 21/9619057, 03 November 2014. (Berita Online), https://m.tempo.co/read/news/2014/11/03/219619057/kata-ahmad-dhani-soal-tato-dan-rokok-menteri-susi. diakses pada 29 Maret 2017.

[2]Dany Permana, *Ditahan KPK, Mantan Menkes Siti Fadilah Menahan Tangis*, Kompas.com, No 17051391, 24 Oktober 2016. (Berita Online), https://nasional.kompas.com.kpk.mantan.menkes.siti.fadilah.menahan.tangis. Diakses pada 29 Maret 2017.

[3] Ndaru Wijayanto, *Bangunan Warga Pamurbaya Akan Dibongkar Untuk Ruang Terbuka Hijau, Bagaimana Tanah Mereka ?*, Tribun Jatim.com, 23 Maret 2017. (Berita Online), http://jatim.tribunnews.com/2017/03/23/bangunan-warga-pamurbaya-akan-dibongkar-untuk-ruang-terbuka-hijau-bagaiman-tanah-mereka. diakses pada 29 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pandangan para ahli fiqih yaitu Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Syaikh Abdul Aziz menyatakan bahwa peran perempuan dalam politik masih menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat. Namun, pendapat banyak ulama terutama ulama fuqoha salaf sepakat bahwa perempuan dilarang menjadi pemimpin. Pernyataan tersebut berdasarkan pada An- nisa' ayat 34 yang artinya :

" *laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian*".[4] Serta hadits nabi yang menyatakan bahwa " *Tidak akan memperoleh keberhasilan suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita*" (HR. Bukhari).[5]

Sedangkan menurut ulama konteporer seperti Yusuf Al-Qordhawi yang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda mengenai kepemimpinan wanita dalam berpolitik. Qordhawi berpendapat bahwa penafsiran terhadap surat An-nisa' 34, laki-laki menjadi pemimpin wanita disini adalah kepemimpinan di dalam rumah tangga, karena laki-laki telah menginfaqkan hartanya, berupa mahar, belanja dan tugas yang dibebankan oleh Allah kepadanya untuk untuk mengurus mereka. Qordhawi membolehkan wanita berpolitik dikarenakan pria dan wanita dalam hal muamalah memiliki kedudukan yang sama, hal ini dikarenakan keduanya sebagai manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalakan kewajiban, dan melakukan amar

[4] Ibid.
[5] Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: ringkasan tafsir Ibnu Katsir I,* terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 703.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ma'ruf nahi mungkar. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin dalam berpolitik.[6]

Sedangkan menurut Quraish Shihab bahwa dalam al-Qur'an banyak menceritakan persamaan kedudukan wanita dan pria, yang membedakannya adalah ketaqwaannya kepada Allah Swt. Tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, dan suku. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta untuk saling bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya[7], sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya :

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana".[8]

Islam sebenarnya tidak menempatkan perempuan berada didapur terus menerus, namun jika dilakukan itu adalah sesuatu yang baik. Pada dasarnya istri tidak berkewajiban melayani suami dalam hal memasak, mengurus rumah, menyapu, menjahit dan sebagainya. Akan tetapi jika itu dilakukan oleh istri maka itu merupakan hal yang baik. Sebenarnya suamilah yang berkewajiban untuk memberinya atau menyiapkan pakaian yang telah dijahit dengan sempurna,

---

[6] Yusuf Al-Qardhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik, Bantahan Tuntas Terhadap Sekulerisme dan Liberalisme*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar 2008), 229.
[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah;Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Volume 15*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 645.
[8]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan yang telah dimasak secara sempurna.[9] Seperti dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 Artinya : "..... *dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf*".[10] Kedudukan perempuan dan pria adalah saling mengisi satu sama lainnya, tidak ada yang superior. Hanya saja laki-laki bertanggung jawab untuk mendidik istrinya menjadi lebih baik dihadapan Allah Swt.

Menurut Musdah Mulia "Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki.karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki, budaya feodal dan semua sistem tiranik, despotik dan totaliter".[11] Menurut penulis pernyataan Musdah Mulia di atas adalah benar karena memang Islam tidak pernah membeda-bedakan suatu kelompok, ras, suku,maupun jenis kelamin, terlihat pada penegasan di dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 artinya: "Hai manusia, sesunggunya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa danbersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal".[12]

---

[9]Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 915.
[10]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... 57.
[11]Musdahh Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), 55.
[12] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 847.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan antarmanusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan, dan kemaslahatan. al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur'an yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga. Hal tersebut merupakan lahirnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Hal ini bisa terwujud jika ada pola keseimbangan dan keserasian antara laki-laki dan perempuan.[13]Perbincangan tentang perempuan tidak ada habisnya. Perempuan selalu menyita perhatian untuk menjadi obyek perbincangan. Setiap perbincangan mengenai perempuan terkadang menempati posisi paling dihormati, di sisi lain perempuan menempati posisi paling rendah, baik dataran sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Bahkan ada ungkapan bahwa prempuan adalah sahabat terbaik agama, namun agama bukanlah sahabat terbaik perempuan.[14]

Adanya ide-ide mengenai pembangunan publik dibingkai atas kepentingan laki-laki semata. Laki-laki adalah kekuasaan, sehingga menjadikan perempuan hanyalah pelengkap, bukan memiliki peran komplementer dalam kenyataan. Dari sini terlihat sangat jelas adanya dikotomis antara peran laki-laki dengan perempuan dalam ranah publik dan domestik. Bahkan dalam ranah domestikpun

---

[13]Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Prespektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 18-19.
[14]Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan masih mengalami ketimpangan gender. Adanya ketimbangan gender dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan *private*.[15]

Pada konstruksi budaya patriarkhi umumnya perempuan telah terdoktrin oleh pola pikir bahwa peran perempuan terbatas pada dapur, sumur, dan tempat tidur, sehingga pada akhirnya hal di luar menjadi tidak penting. Sosok perempuan yang berprestasi dan menyeimbangkan antara keluarga dan karir kerja bahkan menjadi pemimpin menjadi jarang ditemukan. Perempuan seringkali berprestasi karena tuntutan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang tidak bergaji dan tidak pernah berhenti, atau perempuan lainnya yang terlalu fokus untuk urusan luar rumah dan terbengkalai untuk keharmonisan keluarga. Keseimbangan untuk urusan internal keluarga dan pencapaian diri yang terus meningkat semakin sulit untuk dicapai.[16] Fenomena tersebut menurut penulis mudah dijumpai,karena masyarakat Indonesia masih terpengaruh oleh budaya patriarkhi.

Perempuan pada saat ini, banyak yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang baik. Budaya partiarkhi masih sangat melekat di masyarakat sehingga sulit untuk mengakui pengetahuan yang dimiliki perempuan di luar rumah seperti memimpin. Sehingga, anggapan seperti itu perlu diubah dengan memperluas kesempatan perempuan untuk mengaktualisasikan kemampuannya dalam bidang agama, ekonomi, pengetahuan, sosial, maupun politik. Dengan banyaknya keterlibatan mereka dalam menghasilkan karya-karya keagamaan seperti Aisyah yang meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah,

---

[15]Dadang S. Ansohori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 3.
[16]Mutrofin, " Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffta Hassan, *Teosofi*, No 1, (Juni, 2013), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, pengetahuan, sosial, dan politik. Pandangan-pandangan yang lebih akomodatif terhadap perempuan akan terwujud, dan sesuai dengan semangat dasar Islam yang hakiki.[17] Islam yang menjunjung kebaikan, dimana antara laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan.

Menurut Musdah Mulia keterlibatan perempuan dalam politik bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, melainkan bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Perempuan juga harus ikut andil membangun masyarakat sipil yang kuat, membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang publik di mana semua warga negara tanpa terkecuali dapat mengembangkan kepribadian, potensi, dan memberi peluang bagi pemenuhannya. Dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia jumlah kaum perempuan melebihi laki-laki. Badan pusat statistik tahun 2001 menyebutkan jumlah perempuan sebanyak 101.628.816 atau sekitar 51 % dari total penduduk Indonesia, jumlah pemilih perempuan mencapai angka 57% dari jumlah pemilih Indonesia (berdasarkan data pemilu 1999), sehingga dapat disimpulkan perempuan adalah kelompok strategis dan partisipasinya merupakan komponen kunci dalam membangun masyarakat sipil dan demokrasi. [18] Namun, dalam tahun 2014 dan 2015 dilaporkan berdasarkan data susenas jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Data BPS menunjukkan dari total tersebut penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa, yang artinya penduduk perempuan mencapai 42 % partisipasinya dalam

[17]Musdahh Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 105-106.
[18]Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun sebuah masyarakat.[19] Banyaknya penduduk perempuan yang terlihat dalam data BPS, sedangkan partisipasi perempuan dalam perpolitikan hanya sedikit, menurut penulis terdapat beberpa permasalahan yang terjadi seperti, adanya ketimpangan gender dan kurang percaya dirinya perempuan dalam memimpin dalam pemerintahan.

Dengan menghadapi dominasi nilai-nilai budaya patriarki dan situasi deskriminatif, perempuan dalam politik hendaknya dimulai dari kegiatan-kegiatan penyadaran (*awareness rising*). Terutama mengubah cara pandang dan pola pikir (*mindset*) seluruh masyarakat laki-laki dan perempuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan. Perilaku politik mencakup kemandirian, kebebasaan berpendapat, dan tindakan agresif, ketiga karakter ini dianggap sebagai ideal dalam diri laki-laki dan tidak untuk perempuan. Karena itu, masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat dan agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan. Dengan kata lain perempuan yang mempunyai karakter seperti itu bukan tipe perempuan ideal. Ada tiga unsur yang merajut kepemimpinan dalam diri seseorang, yaitu kekuasaan, kompetensi diri, dan agresif kreatif. [20]

Pada zaman sekarang anggapan tersebut telah berubah, ciri kekuasaan dicirikan dengan tidak harus bertolak belakang dengan sifat-sifat feminin, seperti lemah lembut, mengalah, dan memberikan pujian. Perempuan tidak lagi dipaksa untuk mengesampingkan feminitas mereka dan mendorong mereka untuk bersikap

[19] Anton R, m.hidyatullah/berita/nasional/read/2015/11/20/83632/jumlah/pendduk.html, diakses pada 31/03/17.
[20]Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti laki-laki. Sebaliknya mereka menjunjung kekuatan feminitas yang dapat memperkaya bidang politik dan bisnis sehingga pada akhirnya laki-laki menghargai perempuan sebagai mitra bukan sebagai pesaing.

Perempuan tidak akan pernah menginginkan kekuasaan ketika melanggengkan gagasan kekuasaan laki-laki yang sarat dengan kemaskulinan. Kekuasaan menurut definisi perempuan yaitu mencakup kemampuan menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat sesuai dengan hakikat keperempuanan sebagai pengasuh dan pemelihara. Sehingga definisi baru dari kekuasaan merupakan gabungan dari ciri-ciri maskulin dan feminin yang bisa dicapai oleh laki-laki maupun perempuan.[21]

Perlu untuk disosialisasikan pengertian baru tentang kekuasaan yang tidak selamanya bernuansa maskulin sehingga perempuan tidak harus mengeliminasi unsur-unsur feminitas dalam dirinya untuk menggapai kekuasaan. Perempuan tidak menolak gaya feminin dan perilaku sebagai laki-laki untuk berkuasa dan dianggap sebagai pemimpin. Dengan mengembangkan kekuasaan perempuan, perempuan dapat menjadi politisi yang andal, politisi yang tidak akan menyakiti hati lawan politiknya apapun alasannya. Politisi yang tidak akan menggunakan intrik politik yang biasa digunakan oleh laki-laki. Seorang politisi perempuan dapat mengasah sisi keibuannya yang selalu tanggap terhadap kebutuhan orang lain untuk menyelesaikan setiap agenda politiknya. Selain itu, kekuasaan perempuan juga mencakup gagasan memperdayakan orang lain, bukan menginjak orang lain. Kekuasaan hendaknya dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan

[21]Ibid, 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang berguna bagi orang lain. Jabatan hendaknya, ditafsirkan sebagai sarana untuk memberdayakan orang lain, bukan memperdayakan orang lain.[22] Dengan demikian kekuasaan perempuan mencakup nalar, tujuan, agenda, yang hendak dicapai. Musdah Mulia mengutip dari "Sidney Verba, dari Universitas Harvard menegaskan bahwa sumbangan terpenting dari perempuan di dunia politik adalah bahwa mereka lebih berminat mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat daripada memperluas lingkup kekuasaan mereka sendiri".[23]

Terdapat fakta sejarah yang menunjukkan di zaman Rasulullah pun pendapat wanita juga telah di dengar Rasulullah seperti pada peristiwa delegasi Anshar membaiat Rasulullah pada baiat Aqabah dan tercatat sejumlah perempuan mereka bersumpah membela dan melindungi Islam, ini menunjukkan kontribusi positif perempuan dalam kegitan politik. Bahkan Nabi Saw membolehkan perempuan dalam mewakili kaum muslimin berbicara mewakili kaum muslimin, berbicara mewakili mereka dan memberikan jaminan atas nama mereka. Hal itu terlihat nyata dalam kasus Ummu Hani. Nabi Saw telah menerima perlindungan Ummu Hani terhadap seorang kafir pada hari penaklukan kota Mekkah. " *kami melindungi orang yang dilindungi Ummu Hani*". Betapa konkret partisipasi politik perempuan di masa Nabi dan betapa Nabi secara terbuka mengakui eksistensi kepemimpinan perempuan.[24]Tetap harus diingat bahwa tujuan hakiki dari politik perempuan Indonesia, bukan semata meraih kekuasaan. Akan tetapi, tujuan esensinya adalah membangun kesejahteraan dan kemashlahatan bagi

[22] Ibid, 281.
[23] Ibid, 284.
[24]Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Megawati Institute, 2014), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh rakyat Indonesia. Bahkan jika memungkinkan bagi semua manusia dan makhluk di alam semesta.[25]

Dengan terpikirkannya judul "Konsep Kepemimpin Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia" maka, penulis memiliki kecenderungan untuk meneliti mengenai konsep kepemimpinan perempuan dalam berpolitik menurut wacana Siti Musdah Mulia, karena menurut penulis harus dilakukan penyadaran kepada masyarakat yang sangat kental dengan budaya patriarkhinya, terutama membela kebebasan perempuan yaitu yang dilakukan oleh Musdah Mulia, yang bisa disebut sebagai feminis modern Indonesia. menurut Musdah Mulia perempuan adalah makhluk yang tidak boleh dipinggirkan eksistensinya dalam dibilang kepemimpinan dalam skala besar misalkan menjadi pemimpin. Karena konsep teologi juga membenarkan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin, seperti landasan-landasan al-Qur'an surat An-nisa' ayat 1, At-Taubah 71, Al-Hujurat ayat 13, Al- Isra' 70, dan Ali-Imran 195. Tidak hanya itu, konsep sejarah juga membenarkan bahwa di zaman Rasulullah Ummu Hani diperbolehkan untuk menjadi pelindung pada saat baiat *Aqabah*. Konsep kepemimpinan perempuan menurut Musdah mulia mengatakan bahwa perempuan bisa melakukan tugas-tugasnya mulai dari tanggung jawab yang dimilki, jika seorang perempuan melenggang di bidang politik memimpin sebuah wilayah ataupun menjadi pemimpin di suatu daerah maka seorang perempuan akan melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana seorang ibu yang mencukupi permintaan atau kebutuhan anaknya, seorang ibu yang selalu mengalah dan

[25]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendahulukan kebutuhan keluarganya. Dengan sikap ini, maka pejabat perempuan bisa mengaplikasikan dalam kepemimpinannya.

Sehingga Menurut penulis wacana" Konsep Kepemimpin Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia", sangat menarik, dimana seorang aktifis perempuan menjunjung tinggi harkat martabat perempuan, karena tidak selamanya perempuan lemah dalam melakukan kepemimpinan misalkan dalam berpolitik, karena landasan-landasan al-Qur'an dan Hadits sangat mendukung para makhluknya laki-laki dan perempuan diseruhkan untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dijelaskan oleh Musdah Mulia bahwa perempuan dalam melakukan agenda politiknya sangat jelas yaitu memberdayakan masyarakat seperti seorang Ibu yang memenuhi kebutuhan anak-anak serta keluarganya.

Dalam meneliti penulis membatasi kajian-kajian mengenai perempuan dan perempuan berpolitik menurut Musdah Mulia, di mana pemikiran-pemiran Musdah Mulia dari Tahun 2008- 2014 di jadikan referensi oleh penulis. Jika pada waktu yang sudah ditentukan ada perubahan pemikiran dari Musdah Mulia bukan termasuk tanggung jawab penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas sebagaimana penulis uraikan, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perempuan menurut Musdah Mulia ?
2. Bagaimana konsep kepemimpinan perempuan menurut Musdah Mulia dan hal yang melatar belakangi pemikiran Musdah Mulia ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menguraikan beberapa tujuan dari adanya penelitia, sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep perempuan menurut Musdah Mulia.
2. Mengetahui konsep kepemimpinan perempuan menurut Musdah Mulia dan hal yang melatar belakangi pemikiran Musdah Mulia.

D. Penegasan Judul

Untuk menghindari ketimpangan dalam menginterpretasikan dan untuk memudahkan dalam memahami proposal berjudul " Konsep Kepemimpianan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia" diperlukan penjelasan istilah-istilah yang ada pada judul tersebut.

1. Konsep : adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.[26] Dalam hal ini adalah mengenai konsep pemikiran dari Siti Musdah Mulia
2. Kepemimpinan Perempuan : salah satu gerakan feminisme, yaitu kesadaran terhadap perempuan dalam masyarakat, serta adanya tindakan secara sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik perempuan maupun laki-laki, untguk mengubah keadaan tersebut.[27] Dlam hal ini yaitu mengenai kepemimpinan perempuan dalam berpolitik menurut Siti Musdah Mulia.
3. Politik :Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan.[28] Dalam hal ini yaitu mengenai

[26] KBBI, http://kbbi.web.id/konsep, diakses 1 April 2017.
[27] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, Xii.
[28] KBBI, http://kbbi.web.id/konsep, diakses 1 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perempuan, yang menurut Siti Musdah Mulia adalah sebuah bentuk pengelolaan kekuasaan, mulaidari skala kecil yaitu dalam ranah domestik sampai skala besar yitu dalam bentuk kehidupan negara.[29]

4. Siti Musdah Mulia : Seorang intelektual dan sekaligus aktifis perempuan di Indonesia.[30]

E. Kajian Pustaka

Kajian masalah perempuan terus menjadi topik yang hangat tentunya topik ini diulas dari berbagai sisi. Tema perempuan juga melahirkan banyak karya ilmiah mulai dari seminar, skripsi, tesis, bahkan sampai disertasi. Dengan diangkatnya perempuan menurut prespektif Siti Musdah Mulia memperjelas letak perbedaan pembahasan perempuan dengan pembahasan dari peneliti lain, diantaranya :

1. *Studi komparatif pemikiran Murtada Mutahari dan Siti Musdah Mulia tentang perjanjian perkawinan*. Skripsi ditulis oleh Kifayatul Aghniyah fakultas Syari'ah 2014. Dalam skripsi ini kifayatul Aghniyah memfokuskan penelitiannya tentang bagaimana pemikiran Murtada Mutahari dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut dalam perjanjian perkawinan.

[29] Wawancara penulis dengan Musdah Mulia, melaui Email,pada 19 Juni 2017.
[30]Musdah Mulia, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), 187. (Tentang Musdah Mulia akan dijelaskanlebih lanjut pada bab 2 dalam Biografi Siti Musdah Mulia).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Studi komparatif pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang penikahan dini.* Skripsi ini ditulis oleh Syaiful Arifin fakultas Syari'ah 2014. Dalam skripsi ini Syaiful Arifin memfokukskan tentang bagaimana pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan dini bagaimana persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut terkait pernikahan dini.
3. *Studi Pemikiran Musdah Mulia Tentang Perempuan Menjadi Pemimpin Politik: Kajian Historis.* Skripsi ini ditulis oleh Sofatul Jennah, fakultas Adab dan Humaniora 2014. Dalam skripsi ini Sofanatul menjelaskan mengenai peran perempuan dalam politik, melalui kajian historis.

Adanya penelitian terdahulu di atas adalah sebagai acuan untuk penulis, penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian mengenai kepemimpinan perempuan menurut Siti Musdah Mulia, yaitu terfokus pada pemikiran narasumber mengenai kepemimpinan perempuan, yang dilihat dari aspek feminisme dan sosial politik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *kualitatif*, yakni suatu penelitian yang menggunakan teori tertentu untuk memperkuat konsep dan pemahaman tentang objek yang akan diteliti. Teori berfungsi sebagai dasar dalam pengumpulan data dan analisis data. Dalam hal ini enelitian yang dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis adalah mengambil data-data mengenai kepemimpinan perempuan dalam berpolitik menurut Siti Musdah Mulia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam melakukan penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[31] Sehingga dalam penelitian ini dilakukan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer Dan Sekunder

Data sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal data sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.[32] Sehingga dalam penelitian ini data digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen berupa buku-buku, jurnal, dan artikel yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia. Penelitian ini juga menekankan terhadap buku *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, dan karya lain dari Siti Musdah Mulia yang tersebar di berbagai media, serta data dari wawancara penulis dengan Siti Musdah Mulia.

---

[31]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2012), 224.

[32]Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara secara tidak langsung dengan narasumber melalui media elektronik, seperti surat elektronik atau *e-mail*, dengan narasumber yaitu Siti Musdah Mulia.

Dalam hal ini, Siti Musdah Mulia memberikan informasi dalam percakapan melalui e-mail mengenai pemikiran-pemikirannya mengenai kepemimpiann perempuan kepada penulis. Ketika, penulis mengalami kesulitan Siti Musdah Mulia selaku narasumber, bersikap kooperatif dalam membantu kesulitan penulis dengan sangat baik.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan mengelolah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari, mempelajari, dan menyimpulkan apa yang dapat diinformasikan kepeda orang lain.[33] Sehingga dapat diambil keputusan untuk menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

a. Analisis Historis

Analisis historis adalah teknisk analisis yang mengembangkan bentuk kehidupan tokoh, seperti biografi tokoh yang meliputi riwayat hidup, pendidikan serta pemikiran tokoh lain yang mempengaruhi tokoh baik intern maupun

[33] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekstern.[34] Dalam penelitian ini tokoh yang dimaksud adalah mengenai kehidupan Siti Musdah Mulia, dari biografi, pendidikan, dan pemikiran yang mempengaruhi narasumber.

b. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan gambaran secara teratur seluruh konsep tokoh,[35] yang dalam hal ini adalah pemikiran kepemimpinan perempuan dalam berpolitik Siti Musdah Mulia. Selain itu data yang mungkin berasal dari data, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya tersebut di deskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.[36]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjabarkan sistematika secara rinci yaitu:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini. Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, metodologi penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi seperti biografi tentang Musdah Mulia, yang meliputi riwayat pendidikan, karya-karya yang dimiliki Musdah Mulia, dan pemikiran tokoh yang mempengaruhi Musda Mulia. Pada bagian yang lain juga membahas

[34]Anton Bekker dan Achmad Charuz Zubair , Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Karsinus, 1990), 11.
[35] Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 100.
[36]*Ibid*, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai biografi tokoh yang mempengaruhi pemikiran Musdah Mulia yaitu Muhammad Husain Haikal, serta corak pemikiran Husain Haikal.

Bab *ketiga*, merupakan lanjutan penyajian data mengenai konsep perempuan dalam berbagai peran yaitu konsep perempuan dan kepemimpinan perempuan, serta peran perempuan dalam masyarakat, peran perempuan dalam anggota keluarga, peran perempuan sebagai tenaga kerja, dan peran perempuan sebagai warga negara.

Bab *empat*, analisis data, yang membahas tentang konsep perempuan menurut Musdah Mulia, seperti konsep kepemimpinan perempuan menurut Musdah Mulia, perempuan dalam berpolitik menurut Musdah Mulia, dan Realitas peran perempuan berpolitik di Indonesia.

Bab *kelima*, berupa kesimpulan dari pemaparan teori-teori mengenai perempuan menurut Siti Musdah Mulia, dan pemikiran perempuan dalam berpolitik menurut Islam dan Siti Musdah Mulia, serta realitas peran politik perempuan Islam di Indonesia, dan saran atau rekomendasi hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA

A. Mengenai Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia adalah seorang intelektual dan sekaligus aktifis perempuan yang bersikap kritis dan berani menentang arus mayoritas yang tidak rasional dan tidak humanis untuk mewujudkan Islam yang *rahmatanlil alamin*, dan sekaligus membangun bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Banyak organisasi yang telah ditekuninya, dan beberapa penghargaan telah didapatkannya yang akan penulis paparkan di bawah.[37]

Siti Musdah Mulia lahir pada 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Putri pertama dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-pare sedangkan Ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan I/TII di Sulawesi Selatan. Dilihat dari silsilah keluarga Musdah Mulia, keluarganya sangat kental dengan dengan kehidupan agama. Kakek dari Ayahnya, H. Abdul Fattah adalah seorang Mursyid ternama di jamaah tarekat Khalwatiyah.

Musdah Mulia adalah perempuan pertama meraih doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997) dengan disertasi Negara Islam Pemikiran Husain Haikal, (diterbitkan menjadi buku oleh

[37]Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paramadina tahun 2000); perempuan pertama dikukuhkan LIPI sebagai Profesor riset dalam bidang keagamaan di Dapartemen Agama (1999) dengan pidato pengukuhan: Potret perempuan dalam wacana agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokrasi). Atas upayanya mempromosikan demokrasi dan HAM pada tahun 2007 dalam peringatan International Women Days di Gedung Putih US, menerima penghargaan Internasional dari Italy, Woman of The Year pada tahun 2009.[38]

B. Riwayat Pendidikan Siti Musdah Mulia

Riwayat pendidikan yang dialui oleh Musdah Mulia sangat panjang, dan dilakukan di beberapa lembaga formal maupun non formal Dimulai dari SD di Surabaya tamat pada tahun 1969, melanjutkan pendidikan di pesantren As' adiyah di Sulawesi Selatan tamat pada tahun 1977. Menyelesaikan sarjana muda di Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar pada tahun 1980, progam S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN Alauddin Makasar 1982, progam S2 bidang sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syahid, Jakarta 1997, sebelumnya melakukan penelitian dan penulisan disertasi di Kairo, Mesir.

Pendidikan non formal yang ditempuh oleh Musdah Mulia antara lain: kursus singkat mengenai Islam dan Civil Society di University Melbourne, Australia pada tahun 1998, kursus singkat pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand pada tahun 2000, kursus singkat Advokasi penegakan

[38]Ulum, *Biografi Musdah Mulia: Dalam Buku Muslimah Sejati,* www.mujahidahmuslimah.com, diakses 26 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HAM dan demokrasi (International Visitor Progam) di Amerika Serikat pada tahun 2000, kursus singkat manajemen pendidikan dan kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat pada tahun 2001, kursus singkat manajemen pendidikan dan kepemimpian perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh pada tahun 2002. Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis pada tahun 2006; International Leadership Visitor Progam, US Dapartment of State, Washington pada tahun 2007.

Pengalaman pekerjaan Siti Musdah Mulia di mulai sebagai dosen tidak tetap di IAIN Alaudin Makasar pada tahun 1982-1989, sebagai seorang peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama Pusat di Jakarta pada tahun 1990-1999; dosen Institut Ilmu-ilmu al-Qur'an (IIQ) di Jakarta 1997-1999; direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat di Jakarta 1995-sampai sekarang, dosen Pascasarjana UIN Jakarta pada tahun 1997 sampai sekarang, kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000), staf ahli Menteri Negara urusan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas (2000-2001), staf ahli Menteri Agama R.I bidang hubungan organisasi keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain sebagai peneliti dan dosen juga aktif menjadi trainer atau instruktur di berbagai pelatihan khususnya dalam isu atau bidang demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan *civil society*.

Di samping sebagai pegawai negeri sipil (PNS), sejak mahasiswa dikenal sebagai aktivis organisasi pemuda dan ormas atau LSM perempuan. Pengurus KNPI wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 1985-1990; ketua wilayah Ikatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Puteri NU Sulawesi Selatan pada tahun 1982- 1985, ketua wilayah Fatayat NU Sulawesi Selatan pada tahun 1986- 2001, ketua dewan pakar KP- MDI pada tahun 1999-2005, wakil sekjen PP. Muslimat NU pada tahun 2000-2004, ketua umum ICRP tahun 2007-sekarang, pendiri dan direktur LKAJ tahun 1998-2006; ketua panah gender PKBI tahun 2002-2005.

C. Karya- Karya Siti Musdah Mulia

Karya-karya yang pernah ditulis oleh Siti Musdah Mulia diantaranya; *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan Bandung tahun 2005, buku ini menjelaskan kritikan-kritikan terhadap beberapa hukum yang ada di neraga Indonesia yang masih bias gender, terutama yang membahas mengenai undang-undang perkawinan. Merevisi kompilasi hukum Islam yang dipandang masih bias gender.

Islam Menggugat Poligami, gramedia, Jakarta tahun 2000, di dalam buku ini menjelaskan mengenai tatanan kehidupan manusia, yang dirasa oleh Musdah Mulia mendominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Terutama penempatan perempuan sebagai *the second human being* (manusia ke dua), sehingga melahirkan berbagai bentuk penindasan, pelecehan seksual, dan tindak kekerasan lainnya. Salah satu faktor terjadinya hal penindasan, dan tindak kekerasan terhadap perempuan diakibatkan pemahaman umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tekstual. Sehingga, salah satu proyek pentimg dari gerakan penyadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender ini dilakukan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekonstruksi pengkajian ulang dan reinterpretasi terhadap pemahaman ajaran agama secara kontekstual.

Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-hak Reproduksi, LKAJ tahun 2002. Buku ini berbentuk modul pelatihan untuk pelatih hak-hak reproduksi dalam prespektif pluralisme.

Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar Yogyakarta tahun 2008. Buku ini menjelaskan pengalaman Musdah Mulia sebagi koordinator progam *vetor education* (pendidikan pemilih) bagi perempuan di tingkat grass root. Progam tersebut dilakukan untuk menyongsong pemilu tahun 1999. Buku ini menjelaskan mengenai menyadarkan perempuan agar tidak buta terhadap politik, memberikan informasi kepada para perempuan mengenai politik.

Beberapa karya Musdah Mulia lainnya: *Mufradat Arab* Populer pada tahun 1980; *Pangkal Penguasa Bahasa Arab* tahun 1989; *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* tahun 1995; *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal*, Paramadina di Jakarta tahun 1997; Lektur Agama dalam Media Massa, Dep. Agama tahun 1999; *Anatosi Buku Islam Kontemporer*, Dep. Agama tahun 2000;

Kesetaraan dan Keadilan Gender (prespektif Islam), LKAJ tahun 2001; *Pedoman Dakwah Muballighat*, Kp- MDI tahun 2000; *Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU* tahun 2002; *Seluk- Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah*, Jakarta tahun 2002; dan *Perempuan dan Politik*, Gramedia Jakarta tahun 2005.

Islam and Violence Against Women, LKAJ Jakarta tahun 2006; *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Kibar Press Yogyakarta tahun 2007; *Poligami:*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buadaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar Yogyakarta tahun 2007. *Islam dan HAM*, Naufan Yogyakarta tahun 2010.

Musdah Mulia banyak menulis beberapa entri dalam *Ensiklopedi Islam* tahun 1993; *Ensiklopedi Hukum Islam* tahun 1997; dan *Ensiklopedi al-Qur'an* tahun 2000, dan beberapa artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. [39]

D. Tokoh Yang Mempengaruhi Siti Musdah Mulia

Dalam pembahasan penulis dengan Musdah Mulia, melalui email Musdah Mulia, mengatakan bahwa "sejak Tsanawiyah Musdah Mulia sudah membaca beberapa buku dari Husain Haikal, seorang sejarawan Islam yang berasal dari Mesir.[40] Dengan bukunya yang berjudul "*Hayatu Muhammad*" yang diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul "*Peri Hidup Muhammad*", yang isinya menjelaskan mengenai kepemimpinan Rasulullah, sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Musdah Mulia terpengaruh oleh pemikiran Husian Haikal.

Menurut Musdah Mulia di dalam buku Husain Haikal yang berjudul "*Hayatu Muhammad*" menjelaskan bahwa perilaku Rasulullah digambarkan dengan sangat indah oleh Husain Haikal sehingga dari sinilah pemikiran Husain Haikal mengenai kepemimpinan rasulullah sangat mempengaruhi pemikiran Musdah Mulia mengenai kepemimpinan perempuan.

---

[39] Ibid.
[40] Wawancara penulis dengan Musdah Mulia , melalui Email, pada 4 Febuari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedikit dijelaskan oleh Musdah Mulia di dalam buku “Peri Hidup Muhammad” bahwa Islam tidak mementingkan bentuk formalitas suatu negara, melainkan mementingkan aspek moralitas. Islam hanya menggariskan tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, yang juga memadai untuk dijadikan landasan bagi pengelolaan hidup bernegara. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah prinsip tauhid, prinsip sunatullah, dan prinsip persamaan antar manusia.

Pertama, perlunya prinsip tauhid diterapkan dalam pengelolaan hidup bermasyarakat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dan memiliki integritas ruhani yang sempurna, dan secara bertahap dapat mewujudkan pola hubungan antarmanusia dalam semangat egalitarianisme. Implementasi tauhid dalam kehidupan bermasyarakat membuat setiap individu dalam masyarakat menyadari jati diri mereka masing-masing sebagai hamba Allah Swt, memahami harkat dan martabat kemanusiaannya sehingga dengan demikian mereka dapat terbebas dari berbagai macam belenggu, yang pada gilirannya membuat mereka mampu mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Dengan demikian, tauhid pada hakikatnya mendukung sistem demokrasi, dan sebaliknya, menolak sistem totaliter, otoriter, dan tiranik.

Kedua, prinsip sunatullah mendorong manusia bersikap dinamis dan percaya kepada hukum kausalitas serta menolak sikap fatalistis. Prinsip ini juga membawa kepada pengakuan adanya pluralisme dalam masyarakat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kepada konsekuensi agar para pemimpin senantiasa memperhatikan watak-watak manusia yang dipimpinnya.

Ketiga, prinsip persamaan antarmanusia menegaskan bahwa pengelolaan hidup bermasyarakat dalam Islam tidak di dasarkan pada ikata-ikatan primordial, seperti keturunan, kesukuan, dan kehormatan golongan. Itulah sebabnya dalam masyarakat Islam tidak dikenal bentuk mayoritas, tidak ada kelas, kelompok elite atau borjuis, dan juga tidak ada kelompok aristokrat.[41]

Selain terpengaruh dari Husain Haikal, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Musdah Mulia juga terpengaruh oleh pemikiran Munawir Sjadzali yang terdapat dalam buku Musdah Mulia "Negara Islam", di dalam buku tersebut Musdah Mulia mengungkapkan ucapan terimahkasih kepada Munawir Sjadzali, serta terpengaruh oleh ulama' tafsir Quraish Shihab, terlihat dari wawancara Musdah Mulia dengan Gadis Arrivia mengenai "kepemimpinan perempuan", yang menyebutkan mengenai penafsiran surat An-Nisa ayat 34 yang dilakukan oleh Quraish Shihab.

1. Muhammad Husain Haikal

a. Biografi Muhammad Husain Haikal

Nama lengkap husain Haikal adalah Muhammad Husain Haikal. Husain Haikal lahir di desa Kafr Ghanam di daerah Distrik Sinbillawain Propinsi Daqahlia, delta Nil, Mesir pada 20 Agustus 1888 dan meninggal pada 8 Desember 1956. Husain Haikal mulai belajar al-Qur'an di madrasah desanya, dan pindah ke

[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kairo untuk memasuki sekolah dasar sampai sekolah menengah pada tahun 1905. Selanjutnya Husain Haikal meneruskan pendidikannya di tingkat Mahasiswa di fakultas hukum Universite de Paris di Perancis, dilanjutkan sampai tingkat doktoral dalam bidang ekonomi dan politik, sampai memperoleh Ph. D pada tahun 1912 dengan disertasinya yang berjudul "La Dette Publique Egyptienne", dan pada tahun 1912 juga Husain Haikal kembali ke Mesir dan bekerja sebagai pengacara di kota mansura sampai tahun 1922.

Saat Husain Haikal sebagai Mahasiswa sampai menjalankan profesinya sebagai pengacara, Husain Haikal aktif menulis dalam harian al-Jarida yang dipimpin oleh Ahmad Lutfi as Sayyid. Husain Haikal banyak menulis tentang permasalahan sosial dan politik, dan memberikan kuliah dalam bidang ekonomi dan hukum perdata (1917-1922).

Karya-karya Husain Haikal banyak menempati posisi terpenting di perpustakaan berbahasa Arab, selain menulis mengenai permasalahan politik Husain Haikal juga menulis masalah serangkaian sejarah Islam dan Biografi, dan buku- buku Husain Haikal dalam sejarah Islam meruapakan sumber penting studi Islam. Pada tahun 1938 Husain Haikal menjabat sebagai menteri Negara, menteri pendidikan, dan menteri sosial, serta pada tahun 1950 terpilih sebagai ketua majelis senat. Sedangkan pada tahun 1943-1952, Husain Haikal terpilih sebagai ketua partai Liberal Konstitusi (*Liberal Constitutionsl Party*).[42]

Beberapa karya dari Husain Haikal yang fenomena diantaranya dalam bidang sejarah seperti: *Hayatu Muhammad* (1935), *Fi Manzil al-Wahyu* (1942),

[42] Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, www.pustakaonlineMediaisnet.com, diakses pada 22 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Faruq 'Umar sampai dua jilid (1945). Dalam bidang sastra seperti: *Yaumiyyat Baris* (1909), *Zainab* (1914), *Tsaurah al-Adab* (1931), *Hakadza Khulliqat* (1955), *Fi Auqat al-Firaq* (1925), *Asyarata Ayyam fi al-Sudan* (1927), dan *Qishas Mishriyyah* (1969). Serta bidangagama yaitu *Al-Iman wa al-Ma'rifah wa al-Falsafah* (1956).[43]

b. Corak dan Metode Berfikir Muhammad Husain Haikal

Dinamika pemikiran mengenai hadis di dunia Islam modern khususnya di Mesir, banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, dimana kedua tokoh tersebut mengajak umat Islam berpikir dengan kritis atas ketetapan salaf dan juga mengajak pada aplikasi hadis yang tidak hanya taklid. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha mempromosikan penggunaan akal dengan beragam tingkat kekuatan demi menentang pemikiran muslim tradisional yang menolak menerapkan kritik keras terhadap hadis. Dengan adanya pemikiran kedua tokoh tersebut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, tulisan mereka berpengaruh besar pada Husain Haikal sehingga kemudian lahir sebuah karya dari Husain Haikal yaitu historiografi Nabi Muhammad SAW yang berjudul *Hayatu Muhammad.*[44]

Sebagai pengikut dari Muhammad Abduh, Husian Haikal sangat mengutamakan kemerdekaan individu dan kebebasan berpikir. Menurut Husain Haikal " Islam itu mengajarkan kebebasan berpikir tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu dan tidak akan bertentangan anatara keduanya", pendapat tersebut

[43] Ibid.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat di dalam bukunya Husian Haikal yang berjudul *Al-Iman wa al-Ma'rifah wa al-Falsafah.* Dalam menulis karya-karyan Husain Haikal memilih menggunakan metode ilmiah modern yang menurutnya merupakan cara yang baik dalam pandangan ilmu pengetahuan sekarang. Husain Haikal menerapkan metode ilmiah modern tersebut untuk mendukung pemikirannya.[45]

2. Munawir Sjadzali

a. Biografi Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali merupakan tokoh intelektual dan tokoh agama serta diplomat yang lahir di Desa Karanganom, Klaten Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925, yang pada saat itu Indonesia masih dalam kekuasaan Hindia Belanda, kemudian wafat di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2004, pada umur 78 tahun.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh Munawir Sjadzali adalah tingkat Madrasah Tsanawiyah Al- Islam, pesantren Mambaul Ulum di Solo pada tahun 1943, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Of Exter, Inggris, dalam bidang Ilmu Politik dan Hubungan International. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di Master Of Art bidang Filsafat Politik dengan tesis yang berjudul " I*ndonesia's Moslem Parties and Their Political Concepts*" di Georgetown University, Amerika Serikat pada tahun 1959.[46]

Karir yang pernah ditempuh oleh Munawir Sjadzali adalah menjadi guru Sekolah Dasar Islam Gunung Jati, Unggaran pada tahun 1994, perwira

[45] Ibid.
[46] Munawir Sjadzali, Islam *Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990). (riwayat buku penulis, bagian sinopsi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghubung pada revolusi kemerdekaan, Staf Seksi Arab Depli pada tahun 1950, sekertaris III kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika serikat (1956-1959), kepala bagian Amerika Utara, Deplu pada tahun 1959-1963, sekertaris I kedutaan besar Indonesia di Colombo, Srilanka pada tahun 1965, kuasa usaha kedutaan besar Republik Indonesia di Srilanka (1965-1968), kepala biro taat usaha sekertariat jendral dapertemen Luar Negeri sejak tahun 1969-1970, kemudian bertugas di kedutaan besar Indonesia di London pada tahun 1971-1974, kepala biro umum, Deplu (1975-1976), duta besar di Uni Emirat Arab, Bahrain dan Qatar pada tahun 1976-1980, direktur jendral politik dapartemen luar negeri pada tahun 1980-1983, menjabat sebagai menteri agama pada dua periode orde baru; kabinet pembangunan IV pada tahun 1983-1988 dengan masa kerja 1988-1993, dan menjadi anggota dewan pertimbangan agung pada tahun 1993-1998 serta menjabat sebagai ketua komisi nasional Hak Asasi Manusia pada tahun yang sama.[47]

Beberapa buku karya Munawir Sjadzali di antaranya: *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Islam: Realitas Baru dan Orientasi masa Depan Bangsa, Mungkinkah Indonesia Bersendikan Islam ?, Reaktualisasi Ajaran Islam, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini, Ijtihad dan Kemaslahatan Umat, Keberadaan dapartemen Agama merupakan jaminan bahwa Republik Indonesia Bukan Negara Sekuler, Zakat dan Pajak, Ijtihad kemanusian*.[48]

---

[47] Munawir Sjadzali, *Hukum Islam DI Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: PT RemajaRosda Karya, 1991), 66.
[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Corak dan Metode Berfikir Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali mengatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa bahwa telah menjadi pencetus dengan memperkenalkan polapikir baru mengenai pembaharuan hukum Islam, khususnya dalam bidang kewarisan. Menurutnya pada abad ke-12 seorang ulama besar Abu Yusuf dan murid kesayangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa meskipun nash, apabila dahulu dasarnya berwal dari adat dan kebiasaan, dan adat itu berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash tersebut.

Oleh sebab itu, kemudian menurut Munawir Sjadzali bukan dirinya orang yang pertama mengajak umat Islam untuk mempertimbangkan kemungkinan reaktualisasi ajaran Islam, khususnya di bidang kewarisan antara laki-laki dan perempuan. Munawir Sjadzali juga mengambil beberapa pendapat ulama untuk memperkuat pemikirannya, dengan mengambil pendapat Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa umat islam hendaknya harus berani membebaskan pikiran dari belenggu *taqlid*. Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa selama ini merupakan usaha untuk mengikuti anjuran Muhammad Abduh, dan menurut Munawir Sjadzali lebih tepat apabila dirinya dikategorikan ke dalam penganut aliran salaf dan bukan sekuler.[49]

3. Quraish Shihab

a. Biografi Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Febuari 1944, ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab keluarga keturunan

[49] Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arab yang terpelajar.Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama tafsir dan guru besar dalam bidang tafsir. [50] Pendidikan formalnya di mulai dari Sekolah Dasar di Ujung Pandang dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, dengan waktu yang bersamaan "nyatri" di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqihiyyah pada tahun 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, Quraish Shihab berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al- Azhar pada 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Universias al-Azhar, dan melanjutkan studinya di fakultas yang sama, pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk jurusan bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tashri'iy lil al-Qur'an al-Karim* (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari segi hukum).[51]

Quraish Shihab juga dipercaya untuk menjabat wakil rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada Institut Agama Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang. Pada tahun 1980 Quraish Shihab menuntut ilmu di al-Azhar kembali dengan jurusan studi tafsir al-Qur'an untuk meraih gelar doktor, yang hany ditempuh dalamwaktu 2 tahun dan selesaipada tahun 1982 dengan disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Baqi' Tahqiqwa Dirasah* (suatu kajian terhadap kitab Nazm al- Durar karya al- Biqa'i) berhasil dengan mendapat *summa cumlaude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah al-Saraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).

Quraish Shihab, menduduki berbagai jabatan diantaranya: Ketua MajlisUlama Indonesia Pusat (MUI) sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih al-

[50] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 6.
[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an Dapertemen Agama Sejak 1989, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989, dan ketua Lembaga Pengembangan. Quraish Shihab juga aktif di beberapa organisasi seperti: pengurus perhimpunan ilmu-ilmu Syari'ah, pengurus Konsorsium ilmu-ilmu Agama Dapartemen Pendidikan danKebudayaan, dan Asisten Ketua umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998), dan dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, sampai kemudia diangkat sebagai Duta Besar luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Dijiabauti berkedudukan di Kairo.

Kegiatan yang dilakukan oleh Quraish Shihab setiap harinya juga dikenal sebagai penceramah. Kegiatan ceramahnya dilakukan di sejumlah masjid di Jakarta, seperti: Masjid al- Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik.[52]

Karya-karya dari Quraish Shihab di antaranya: Mukjizat al- Qur'an di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaaan Ghaib (1996), Tafsir al- Amanah (1992), Membumikan al- Qur'an (1995), Studi Kritis al-Manar (1994), Tafsir al- Misbah (2003), Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1998).

b. Corak dan Metode Berfikir Quraish Shihab

Dalam menulis tafsir, metode yang digunakan oleh Quraish Shihab adalah lebih bernuansa kepada tafsirtahlili, Quraish Shihab menjelaskan ayat-ayat al-

[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang lebih menonjolkan petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan manusia serta menghubungkan pengertian ayat-ayat al-Qur'an dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Uraian yang disajikan memperhatikan kosa kata atau ungkapan al-Qur'an dengan menyajikan pandangan-pandangan para pakar bahasa, kemudian memahami ayat dan dasar penggunaan kata tersebut oleh al-Qur'an. [53]

[53]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KONSEP PEREMPUAN DALAM BERBAGAI PERAN

A. Konsep perempuan dan kepemimpinan perempuan

1. Konsep Feminisme

Feminisme atau gerakan feminis (perempuan), dapat dipahami sebagai kajian (paradigma), metodologi yang bertujuan untuk mengungkap bahwa dalam realitas sosial, budaya, politik, terdapat ketimpangan gender, yaitu relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan, ketertindasan perempuan, stereotipe yang terjadi pada perempuan. Meskipun feminisme ini bukan sebagai teori atau cara pandang, namun feminisme dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan yang memiliki tujuan. Beberapa tujuan dari adanya gerakan feminisme ini diantaranya; memberikan informasi kepada perempuan mengenai kehidupan, memberikan perubahan kepada kehidupan perempuan yang mengalami ketidakadilan gender, serta subordinasi.[54]

Terdapat gelombang besar gerakan feminisme; yang pertama, dimulai pada sekitar tahun 1830-1920, seperti tokoh-tokonya: Mary Wollstoncraft, Sojourner Truth, Elizabeth Candy Stanton. Pada periode pertama, feminisme tersebut memperjuangkan agar mendapatkan akses pendidikan, penuntutan hak suara, dan memperjuangkan hak-hak sipil.

[54]Akhyar Yusuf Lubis, *Pemikiran Kritis Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada gelombang kedua sekitar tahun 1920-1970; pada periode kedua para feminis sudah memiliki kemandirian berfikir, sehingga pada periode ini para feminis ingin memperjuangkan upaya untuk menghasilkan teori-teori baru yang didasarkan dari pengalaman dan harapan kaum perempuan. Tokoh-tokoh dalam periode kedua diantaranya: Simone De Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millet, Germaine Greer. Pada periode kedu gerakan feminisme memperjuangkan agenda supaya perempuan mendaptkan akses bekerja, mendapatkan pendidikan, dan kontrol terhadap kelahiran atau kebijakan upah yang setara. Selain itu juga, pada periode kelompok kedua ini memperjuangkan mengenai egalitariannisme atau kesetaraan, dan berusaha memahami keadaan terjadinya penindasan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

Pada gelombang ketiga, dimulai sekitar tahun 1960-1970, pada periode tersebut feminisme dipengaruhi oleh teori kritis dan teori postmodernisme serta post strukturalisme lewat pemikiran para tokohnya diantaranya: Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques Lacan dan Francois Lyotard. Adanya pemikiran postmodernisme dan post struktualisme sehingga memberikan perbedaan dalam upaya-upaya memajukan perempuan. Jika pada periode kedua antara laki-laki dan perempuan sangat dipisahkan dalam hal ketidakadilan gender, maka pada periode ini tidak terlihat jelas pemisahan antara laki-laki dan perempuan, namun upaya-upaya seperti isu-isu mengenai politik, perbedaan, dan lokalitas diperjuangkan pada periode ini. Tokoh-tokoh dalam periode ini seperti Helen Cixous, Luce Iragary dan Yulia Kristeva.[55]

[55] Ibid, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan feminisme dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, dalam kajian feminisme terdapat beberapa istilah yang melekat dan tidak dapat dipisahkan seperti seks, dan gender. Dalam istilah seks, dan gender terdapat beberapa perbedaan, seperti pada arti seks lebih mengacu pada perbedaan genetis dan biologis (jenis kelamin perempuan dan laki-laki), sedangkan gender mengacu pada sifat, karakter, ciri-ciri dan fungsi yang melekat kepada individu, misalnya seorang laki-laki adalah kuat, rasional, mecari nafkah, harus tampil di depan publik, sedangkan perempuan adalah lemah, emosional, harus berada di ruang privat (menjaga keluarga). Sehingga adanya gender yang terbentuk dari hasil konstruksi sosial menimbulkan yang disebut ketimpangan gender atau ketidakadilan gender. Adanya ketidakadilan gender ini sering terjadi pada perempuan, beberapa contoh misalkan jika ada keluarga kekurangan secara ekonomi maka laki-laki yang lebih diutamakan mendapat pendidikan, sedangkan perempuan dikorbankan untuk tidak mendapatkan pendidikan, karena beranggapan perempuan saat dewasa akan di rumah dan mengurusi keluarga sedangkan laki-laki yang bekerja mencari nafkah dan sebagai tulang punggung keluarga, sehingga terbentuklah marginalisasi. [56]

Dari beberapa penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa isu-isu mengenai feminisme sudah terbentuk pada tahun 1920, yang dari ketiga periode munculnya feminis adalah sama-sama menginginkan kebebasan untuk tampil di depan publik, seperti mengeyam pendidikan, berusaha mendapatkankan pengakuan dari pemerintah. Tidak seperti pada abad 21 saat ini, perempuan

[56] Ibid, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuarakan aspirasinya melalui ingin ikut serta dalam pembentukan suatu negara atau dengan kata lain menjadi pemimpin masyarakat.

Dari penjelasan diatas mengenai isu-isu ketidakadilan gender, dalam Islam isu ketidak adilan gender masuk pada abad ke 19. Budaya kebangsaan Eropa muncul memberikan perubahan dalam bidang politik, ekonomi, dan kultural yang mengangkat derajat perempuan.[57] Menurut Nasaruddin" secara sosio- historis, sejak awal Islam menegaskan bahwa diskriminasi peran dan relasi gender adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihilangkan. Islam memberikan amanah manusia untuk memperhatikan konsep keserasian, keselarasan, keseimbangan, keutuhan baik lingkungan dan sesama manusia".[58]

Dalam Islam diperkenalkan konsep kesetaraan gender yang mengacu pada ayat-ayat al-Qur'an seperti: An-Nahl (16:90) yang menjelaskan mengenai perwujudan keadilan dan kebajikan, An-Nisa' (4:58) mengenai keamanan dan ketentraman, Ali-Imron (3:104) mengenai menyeru pada kebaikan dan mencegah kejahatan.[59] Islam adalah agama yang sangat menekankan kehormatan sesama manusia, seperti pada surat An-Nisa' ayat 32 yang artinya:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

[57] Kadarusma, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 61.
[58] Nasaruddin Umar, *Rekonstruksi Pemahaman Gender Dalam Islam: Agenda Sosio- Kultural dan Politik Peran Perempuan*, (Jakarta: el- Kahfi, 2002), 11.
[59] Syaifuddin Al Ayubi, "Konsep Dan Interpretasi Ayat-Ayat Gender Dalam Wacana Sosial Politik", *Jurnal Penelitian Keislaman*, vol 11. No 2, (Juli 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" *Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunianya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*"[60]

Dari uraian ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an menjelaskan hak perempuan seperti: hak waris, hak di luar rumah, hak memperoleh pekerjaan, hak politik, hak memberikan kesaksian, dan hak menentukan pendidikan. Nurcholis Madjid mengatakan bahwa " semua manusia dipandang sama dalam harkat martabat, tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaaan, kesukuan ataupun lainnya. Satu-satunya aspek yang membedakan antara manusia satu dengan lainnya adalah ketakwaannya.[61]

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa, feminisme tidak hanya ada di dalam kebudayaan barat, namun Islam juga sangat mendukung feminisme. Karena, Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan kepada semua umatnya baik laki-laki maupun perempuan. Islam menolak semua kebijakan yang membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, karena menurut apa yang telah tercantum di dalam al-Qur'an, yang membedakan satu dengan yang lainnya hanyalah persoalan ketakwaan setiap individu kepada Allah Swt. Beberapa penjelasan mengenai feminisme telah dijelaskan di atas, untuk melengkapi informasi mengenai konsep feminisme maka

[60] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 122.
[61] Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2000), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada penjelasan berikutnya akan menjelaskan mengenai konsep kepemimpinan perempuan.

2. Konsep Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan adalah hal penting dan paling utama dalam pembahasan mengenai kemajuan suatu kelompok, organisasi, atau suatu bangsa dan negara. Dengan adanya pemimpin tersebut suatu kelompok, organisasi, bangsa atau negara akan terlihat arah, dinamika, dan kemajuan-kemajuan yang akan diberikan oleh pemimpin tersebut. Ketika membicarakan mengenai kepemimpinan perempuan banyak terjadi perbedaan pendapat, antara yang menyetujui jika perempuan boleh memimpin dan pendapat yang tidak setuju jika perempuan tampil di depan publik dan menjadi seorang pemimpin.

Menurut pandangan para ahli fiqih menyatakan bahwa peran perempuan dalam politik masih menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat. Namun, pendapat banyak ulama terutama ulama fuqoha salaf sepakat bahwa perempuan dilarang menjadi pemimpin. Pernyataan tersebut berdasarkan pada An-nisa' ayat 34 yang artinya : " *laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian*".[62] Serta hadits nabi yang menyatakan bahwa *" Tidak akan memperoleh keberhasilan suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita"* (HR. Bukhari).[63]

Sedangkan menurut ulama konteporer seperti Yusuf Al-Qordhawi yang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda mengenai kepemimpinan wanita

[62] Ibid.
[63] Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: ringkasan tafsir Ibnu Katsir I,* terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 703.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berpolitik. Qordhawi berpendapat bahwa penafsiran terhadap surat An-nisa' 34, *" laki-laki menjadi pemimpin wanita disini adalah kepemimpinan di dalam rumah tangga, karena laki-laki telah menginfaqkan hartanya, berupa mahar, belanja dan tugas yang dibebankan oleh Allah kepadanya untuk untuk mengurus mereka"*. Qordhawi membolehkan wanita berpolitik dikarenakan pria dan wanita dalam hal muamalah memiliki kedudukan yang sama, hal ini dikarenakan keduanya sebagai manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalakan kewajiban, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin dalam berpolitik.[64]

Hampir sama dengan pendapat Yusuf Al-Qordhawi, menurut Quraish Shihab bahwa dalam al-Qur'an banyak menceritakan persamaan kedudukan wanita dan pria, yang membedakannya adalah ketaqwaannya kepada Allah Swt. Tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, dan suku. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta untuk saling bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya, sebagai mana yang telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya : *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan rasulnya"l. Mereka itu*

[64] Yusuf Al- Qardhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik, Bantahan Tuntas Terhadap Sekulerisme dan Liberalisme*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar 2008), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana".[65]

Islam sebenarnya tidak menempatkan perempuan berada didapur terus menerus, namun jika dilakukan itu adalah sesuatu yang baik. Pada dasarnya istri tidak berkewajiban melayani suami dalam hal memasak, mengurus rumah, menyapu, menjahit dan sebagainya. Akan tetapi jika itu dilakukan oleh istri maka itu merupakan hal yang baik. Sebenarnya suamilah yang berkewajiban untuk memberinya atau menyiapkan pakaian yang telah dijahit dengan sempurna, makanan yang telah dimasak secara sempurna.[66] Seperti dalam al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 233 Artinya : *"..... dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf*".[67] Kedudukan perempuan dan pria adalah saling mengisi satu sama lainnya, tidak ada yang superior. Hanya saja laki-laki bertanggung jawab untuk mendidik istrinya menjadi lebih baik dihadapan Allah Swt.

Berdasarkan ketetapan undang- undang telah ditetapkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. Pembahasan mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat dilihat dalam undang-undang dasar 1945 pasal 27, ditegaskan juga di dalam garis-garis besar haluan negara tahun 1993, dan pengukuhan konvensi PBB tahun 1952

---

[65]Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 291.
[66]Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 915.
[67]Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*,.... 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hak-hak politik perempuan dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.[68]

Gadis Arivia mengatakan bahwa " pengalaman perempuan harus diikut sertakan dalam politik sebagai salah satu asas demokrasi".[69] Terdapat banyak wacana yang menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki diberikan hak yang sama dalam ikut serta memajukan negara, maka perempuan harus ikut serta dalam memimpin atau tampil di depan publik untuk menyuarakan pendapatnya. Konsep *malestream*, adalah suatu konsep yang berlaku dalam tingkat lokal tataran masyarakat diatur lebih banyak oleh pemimpin laki-laki. Sehingga, hal tersebut sangat sulit untuk perempuan masuk dalam tatanan kenegaraan. Suasana agresivitas maskulin, uang dan sedikitnya ruang untuk perempuan yang disediakan oleh partai menjadi semakin memojokkan perempuan. Konsep atau kerangka kerja *malestream* harus dihilangkan, perempuan harus berupaya untuk mengambil kesempatan dan menguatkan kepentingan-kepentingan perempuan di setiap bidang publik.

Dalam al-Qur'an menguraikan hak-hak perempuan seperti pada surat An-Nisa'ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

[68] Alimatus Sahrah, "Persepsi Terhadap Kepemimpinan Perempuan" , *Anima*, Indonesian Psychological Journal, Vol 19, No 3, (2004), 222.
[69] Gadis Arivia, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" *Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu*."[70]

Dapat disimpulkan dalam surat An-Nisa' ayat 32 secara tegas menjelaskan mengenai hak perempuan, seperti hak waris, hak diluar rumah, hak memperoleh pekerjaan, hak politik, hak memberikan kesaksian, hak memilih teman hidup, hak menentukan pendidikan dan lainnya. Salah satu bentuk pengakuan Islam terhadap kesamaan dan kesetaraan tersebut disandarkan pada posisi laki-laki dan perempuan dipandang dari derajat ketakwaannya tanpa membedakan jenis kelamin manusia.

Syaifuddin mengatakan bahwa" di dalam Islam terdapat lima prinsip mengenai status perempuan diantaranya: kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, hak-hak yang sama dalam hubungannya dengan alam, posisi perempuan dalam struktur sosial, keberagaman dalam kesatuan, dunia penciptaan bersifat permanen dan sempurna meski beragam". [71] Pembahasan mengenai kesetaraan laki-laki perempuan dihadapan Allah adalah tidak ada perbedaan, yang membedakan hanya tingkat ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya.

Hak-hak yang sama dalam hubungan dengan alam, relasi antara manusia dengan alam dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Jaatsiyah ayat 13, yang artinya *"Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang dilangit dan apa yang di bumi*

[70] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 122.
[71] Syaifuddin al Ayubi, "Konsep Dan Interpretasi Ayat-Ayat Gender Dalam Wacana Sosial Politik", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol 11, No 2, (Juli 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semuanya, (sebagian rahmat) dari-Nya....".[72] Allah menegaskan bahwa pemanfaatan dan penguasaan alam harus bersamaan dengan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan fisik seseorang. Seorang manusia mempunyai hak dalam memanfaatkan alam, namun juga harus bertanggung jawab atas keberlangsungan alam.

Posisi perempuan dalam struktur sosial, laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan, laki-laki dan perempuan mempunyai peran aktif dan menikmati hak-hak sosialnya, seperti al-Qur'an al-Ahzab ayat 72 :

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ

إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

" *sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat langit, bumi, dan gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu danmereka khawatir akan menghianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia...".* Dapat disimpulkan bahwa laki-laki tidak lebih unggul dibandingkan perempuan, karena keduanya mempunyai tanggung jawab dan hak-hak sosial yang sama. Tugas-tugas kemasyarakatan harus dipusatkan kepada semua jenis kelamin sesuai dengan kapasitas masing-masing.[73]

---

[72] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 816.
[73] Syaifuddin al Ayubi, "Konsep Dan Interpretasi Ayat-Ayat Gender Dalam Wacana Sosial Politik", *Jurnal Penelitian Keislaman*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam membolehkan wanita bekerja di luar rumah dalam rangka mendukung pembangunan masyarakat, misalnya sebagai guru, dosen, dekan, rektor, manager, atau direktur perusahaan, pemilik supermarket, pengacara dan sebagainya. Dari sekian banyak peran, tugas sekaligus aktivitas yang bisa atau perlu didalami perempuan sebagai anggota masyarakat, tentunya pilihan perempuan juga didasarkan pada ketentuan syara'. Perkembangan gerakan feminis akan mengarahkan pada upaya untuk melibatkan perempuan dalam kehidupan politik. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan, meskipun secara kuantitatif sudah terjadi kenaikan yang signifikan pada keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan pendidikan.[74]

Adanya gerakan-gerakan yang menyuarakan mengenai kebebasan perempuan dalam ranah publik terkadang tidak relevan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis dalam bentuk teks-teks suci yang diyakini secara pasti kebenarannya, tetapi tidak dengan pemahaman dan penafsirannya. Penafsiran terhadap teks-teks yanga ada di dalam al-Qur'an sering dianggap bias kepentingan, tergantung siapa yang menafsirkan, dan demikian juga dengan penerapan satu dalil pada suatu kasus tertentu sering tidak relevan, bahkan mungkin bertolak belakang. Dengan ungkapan lain, harus ada upaya reintreperetasi teks-teks suci yang ada di dalam al-Qur'an sehingga maknanya sejalan dengan konteks, sehingga terkesan bias gender.[75]

---

[74] Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 130- 134.
[75].Siti Musdah Mulia, " Menggagas Kurikulum yang Berperspektif Gender", *perta*, vol VI, (No 1, 2003), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaum perempuan mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga, tampillah beberapa perempuan ungul dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, sastra, syair, perdagangan dan sebagainya. Mereka adalah perempuan perkasa dan pemberani, dan ikut berjuang dalam pertempuran. Misalnya, Sulma bin Anar dari bani Addiy al- Najjar, yaitu seorang pahlawan yang gagah perkasa, Sulma tidak pernah menikah, tetapi semua urusan ada ditangannya.[76]

Dalam peperangan Uhud misalnya, Umrah bin Al-Qamah Al-Harissiyah adalah pembawa dan pengibar panji peperangan dan Hindun bin Abi Sufyan memberi semangat kepahlawanan kepada para pasukan perang. Perempuan Arab pada masa Jahilyah pada umunya memilih sendiri calon suami mereka sebelum perkawinan. Orang tua tidak akan mengawinkan putrinya sebelum dimusyawarahkan dengan yang bersangkutan. Perempuan digambarkan terhormat dan jauh dari hal-hal yang tidak baik, dan ini diperoleh sebagai akibat dari kecintaan mereka terhadap kebebasan dan percaya diri. Walaupun, dari sisi lain, terungkap mengenai kebiasaan buruk terhadap yang terdapat pada sebagaian masyarakat Arab jahiliyah, seperti membunuh anak perempuan mereka dengan menguburkannya hidup-hidup. Namun, keadaan itu tidak berlaku umum pada kabilah-kabilah Arab dan hanya terjadi pada kabilah tertentu, seperti kabilah Bani Tamim Ibn Murr dan bani Asad. Keadaan tersebut hanya berlangsung dalam waktu yang tidak lama, karena bertentangan dengan hukum akal dan perasaan kedua orang tua. Keadaan inilah yang membuat yang membuat mereka tampil

[76]Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian politik Perempuan*, (Jakarta: Kibar Press, 2008), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tokoh-tokoh perempuan yang terkenal, yang pengaruhnya terbukti sampai pada permulaan Islam. Di antara tokoh-tokoh perempuan yang memberikan kontribusinya terhadap Islam yaitu di antaranya: Sulma bin Amr, Khadijah bin Khuwailid, Al-Khansa, Kharnaq, Hind bin Al-Khass, dan Zainab.[77]

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa perempuan juga harus mengambil peran dalam memajukan suatu negara, karena sebagai warga negara masyarakat mendapat beban yang sama yaitu memajukan suatu daerah dalam ruang lingkup kecil dan bahkan negara dalam ruang lingkup yang lebih besar yaitu laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali, hal ini juga di dasarkan pada beberapa penjelasan di atas seperti pada al- Qur'an surat At-Taubah ayat 71 yang artinya: *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana*".[78]. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan jika, antara laki-laki dan perempuan mempunyai tugas yang sama yaitu melakukan hal kebaikan dan meninggalkan hal yang buruk, dapat ditarik benang merah dari ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan wajib melakukan hal kebaikan seperti dalam memimpin suatu negara baik memimpin sebagai bupati, menteri, bahkan kepala Negara. Pada masa Rasulullah sahabat-sahabat perempuan ikut andil dalam melaksanakan kegiatan di luar rumah atau di depan publik, dan bahkan seperti Ummu Umarah berhasil melindungi Rasulullah dari busur panah yang diberikan

[77] Ibid, 54.
[78] Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh musuh pada saat itu. Peran perempuan tidak diraguhkan lagi keberadaannya, pada zaman Rasulullah sudah banyak sahabat perempuan yang memberikan kontribusinya terhadap pembelaan kepada Islam, tidak ada alasan perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin.[79] Pendidikan, tingkat intelektual, yang dimiliki perempuan pada zaman sekarang tidak diragukan lagi, karena untuk menggapai pendidikan sangat mudah, dan berkembangnya teknologi sangat berperan terhadap pengetahuan yang dimiliki perempuan pada zaman sekarang, untuk mengakses teknologi sangat mudah, sehingga mudah untuk perempuan dalam *upgradeding* tingkat pengetahuannya, agar perempuan tidak dipandang sebelah mata dalam hal tingkat kebijaksaan, loyalitas, intelektual, serta kepemimpinannya.

B. Perempuan Dalam Berbagai Peran

1. Peran Perempuan Sebagai masyarakat

Perempuan memiliki hak kebebasan untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri, perempuan bukan diciptakan untuk kesenangan orang lain ataupun untuk melayani orang lain. Sebagai ciptaan yang sederajat, perempuan mempunyai hak otonomi atas kehidupannya. Ketika perempuan hanya dijadikan sebagai properti maka, pada saat itu perempuan kehilangan otensitas keindividualitasnya yang otonom.

Perempuan dijadikan properti yang memiliki sifat pasif, pasrah, tidak punya keinginan, tidak kreatif, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki ambisi,

[79] Ibid, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak produktif. Jika itu diberikan kepada perempuan maka hal tersebut akan menghapus sifat kreativitas dan produktivitas yang dimiliki oleh perempuan. Kondisi tersebut memarjinalkan perempuan karena kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi perempuan untuk memasuki persaingan dalam sistem kapitalisme.[80]

Kapitalisme merubah perempuan yang berada dalam posisi sektor privat menjadi harus berani tampil dalam sektor publik. Hal tersebut, membawa dampak bagi perempuan sebagai masyarakat atau komunitas. Perempuan pada zaman dahulu menduduki dan mengelola bagian domestik, namun seiring berjalannya waktu pekerjaan domestik ditarik keluar dari kehidupan keluarga dan dialihkan ke dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu dalam sektor publik.

Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dalam sektor publik tidak lagi bersifat sukarela dan pengabdian, namun berubah menjadi komersial dan profesional. Sebagai anggota masyarakat dan komunitas yang kapitalis, perempuan harus memiliki kebebasan dan demokrasi. Ketika perempuan menghadapi perlakuan yang tidak adil karena kefeminitasannya, maka perempuan harus bangkit untuk memeperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama seperti laki-laki.[81]

2. Perempuan Sebagai Anggota Keluarga

Keluarga adalah sumbangan positif bagi tatanan sosial, salah satu fungsi keluarga adalah untuk menjadi model bagi hubungan-hubungan kekuasanan. Relasi di dalam keluarga yang merupakan model relasi kekuasaan di dalam

[80] Marselina Nope, *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*, (Yogyakarta: Rasist Book, 2005), 144.
[81] Ibid, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang lebih luas. Prespektif marxiz melihat keluarga melalui fungsinya untuk melayani kepentingan pemegang kekuasaan ekonomis di dalam masyarakat, dengan cara memproduksi dan mensosialisasikan pekerja muda sebagai partisipan kerja berdasarkan pembagian kelas. Keluarga dipandang sebagai sistem yang mereproduksi struktur dominasi yang ada dalam dunia ekonomi.[82]

Dari lingkungan keluarga tradisional dapat kita lihat dalam pengelolahan pekerjaan rumah tangga 95% akan dibebankan kepada Ibu, dan bantuan serta keterlibatan ayah dan anak-anak sangat sedikit. Peran pembantu rumah tangga dalam menangani pekerjaan secara fisik cukup besar, namun tanggung jawab akhir tetap ditangan Ibu, sehingga ibu merasa terperas energinya dalam mengurus pekerjaan rumah. Tumbuhnya upaya-upaya untuk bersama dan saling mendukung antara sesama anggota keluarga sebaiknya dengan cara-cara yang lebih demokratif di dalam menangani pekerjaan rumah tangga.[83]

Adanya permasalahan patriarki oleh para feminis, prespektif itu mulai mendapat semangat. Para feminis menganggap patriarki sebagai masalah serius untuk menjelaskan kondisi kehidupan di antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah keluarga. Pada dasarnya kelompok feminis memandang keluarga sebagai suatu institusi melalui struktur patriarkalnya, menindas perempuan dengan cara sosialisasi yang membedakan menurut gender.

Dalam masyarakat yang menganut sistem kapitalisme kehidupan keluarga dipengaruhi oleh nilai-nilai kapitalisme. Suami, istri, dan anak dibebani tugas masing-masing sesuai dengan peran meraka, keluarga dilihat sebagai unit

[82] Kris Budiman, *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 142.
[83] Mar Joire Hansen Shaevitz, *Wanita Super*, "terj", Agus Susanto, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produksi terkecil dengan para anggotanya sebagai pelaku produksi, secara konvensional, ayah adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dengan kehidupan keluarganya maka ayah harus bekerja, ibu adalah berkerja dalam ruang domestik yang mengelola rumah tangga, dan anak adalah sebagai tenaga kerja tambahan dengan membantu kedua orang tuanya.[84]

Dalam kesetaraan, hak-hak perempuan untuk mengekspresikan keinginannya harus dihargai. Begitu juga ketika perempuan berpendapat mengenai dirinya. Hal ini juga berperan dalam pengambilan keputusan dalam bereproduksi. Dengan adanya kebebasan terhadap individual seorang perempuan dibebaskan untuk berkuasa dan memiliki dirinya sendiri. Masalah keputusan dan kehendak apabila seorang perempuan memutuskan untuk memiliki anak. Dengan konsekuensi perempuan berkewajiban dan bertanggung jawab pada setiap keputusan.

Perempuan adalah individu yang memiliki kebebasan, peran perempuan dalam keluarga seharusnya seperti relasi yang telah diberitahukan oleh Allah bahwa suami-istri harus saling tolong-menolong dan saling mendukung dalam suka maupun duka sesuai dengan kodratnya. [85]

3. Peran Perempuan Sebagai Tenaga Kerja

Dalam zaman modern saat ini, bangsa dan perempuan Indonesia memasuki suatu era baru yaitu industrialisasi. Namun, terdapat problem bagi

[84] Marselina Nope, *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*, 141.
[85] Ibid, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dalam menyongsong zaman industrialisasi, terdapat tiga permasalaha diantaranya kemiskinan, menyebabkan perempuan tidak mendapat kesempatan untuk mengeyam pendidikan yang memadai termasuk penguasaan keterampilan yang rendah. Kedua, adanya persaingan antara buruh laki-laki dan perempuan, keterampilan yang relatif rendah oleh buruh perempuan membuat perempuan dalam posisi rendah, ketiga dilema yang dialami oleh perempuan antara keinginan mereka untuk bekerja untuk memperoleh pendapatan yang mandiri dan tugas mereka sebagai ibu rumah tangga hal tersebut sangat sulit diatasi oleh perempuan.[86]

Hukum Islam memperbolehkan perempuan untuk mendapatkan waris dan secara independen memiliki harta kekayaan dan boleh mengelola sendiri kekayaannya. Sehingga, wanita perlu untuk bekerja di luar rumah, namun menjadi sebuah permasalahan perempuan masih diberikan beban pekerjaan rumah tangga setelah pulang dari bekerja. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa membebankan pekerjaan rumah kepada wanita yang bekerja di luar adalah sebuah penindasan.

Evi Muafiah mengatakan bahwa "nafkah adalah pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti pemberian terhadap istri, anak, orang tua, kerabat", nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang suami kepada istrinya".[87]

Dalam suatu hadits dijelaskan bahwa nafkah adalah kebutuhan antara lain pakaian, makanan dan perbuatan yang baik. Perkawinan adalah salah satu

---

[86] Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, & Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 84.
[87] Evi Muafiah, " Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam", *Cendikia*, Vol 3, No 2 (Juli-Desember, 2005), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munculnya pemberian nafkah. Kewajiban tersebut tetap melekat untuk suami walaupun perempuan/ istri mempunyai penghasilan sendiri. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah sering menimbulkan kesalah pahaman. Memberi nafkah mengandung arti mencukupi kebutuhan dan itu dilakukan dengan bekerja, sehingga muncul kesimpulan hanya suami yang boleh bekerja, istri sebagai pihak penerima nafkah hanya boleh berdiam diri di rumah. Dalam masyarakat muncul istilah suami kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Istilah tersebut memunculkan konotasi pada pembagian wilayah kerja antara publik dan domestik yang sudah membudaya. Sehingga, ketika istri bekerja di wilayah publik yang dihargai hanya sebagian daripada hasil kerja laki-laki, karena perempuan sifatnya hanya membantu. Dari sini muncul anggapan bahwa hal tersebut menyudutkan pihak perempuan dalam dunia kerja.[88]

4. Peran Perempuan Sebagai Warga Negara

Menurut Nasaruddin Umar mengakatakan bahwa realitas isu-sisu gender sering terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat maupun institusi negara dengan berbagai ragam dan variasi yang dialami oleh perempuan, khususnya di tempat kerja, ketidakadilan dan kesetaraan gender bahkan mengarah pada kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, perkosaan, dan merendahkan martabat kaum perempuan.[89]

Salah satu syarat kebebasan politik adalah adanya kebebasan ekonomi, sebagai konsekuensinya, perempuan dituntut untuk mampu mengaplikasikan

[88] Ibid, 76.
[89] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Prespektif Al- Qur'an*, (Jakarta: el- Kahfi, 2002), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan politik melalui kegiatan ekonomi seperti bekerja. Karena perempuan tidak akan dapat berpartisipasi secara penuh sebagai warga negara jika perempuan dalam belenggu ekonomi. Terdapat beberapa isu yang menghalangi perempuan tampil dalam sektor perpolitikan, salah satu diantaranya penyimpangan dari kapitalisme atau paradoks yang dibawa oleh masyarakat kapitalis. Kapitalisme menuntut sektor domestik menjadi sektor publik, sebuah negara adalah replika dari adanya suatu keluarga, sehingga kapitalisme mendorong adanya implementasi patriarki menjadikan sebagai posisi terpenting dalam sebuah keluarga. Terbatasnya partisipasi perempuan dalam politik berhubungan dengan pembagian kerja. Politik termasuk dalam sektor publik sehingga hanya pantas untuk laki-laki dengan kata lain laki-laki mempunyai posisi pada subjek eksternal, sedangkan perempuan bertanggung jawab terhadap subjek internal dan domestik. Dengan anggapan tersebut tidak dapat dipisahkan pemikiran mengenai kepemimpinan adalah untuk maskulinitas, sedangkan kepasifan dan pengasuhan adalah sikap alamiah dari feminitas. Namun, dengan meningkatnya jumlah perempuan yang tampil di depan publik dengan bekerja dan menginginkan adanya kesetaraan gender. Seorang perempuan mampu memberikan kontribusi seperti laki-laki, sehingga laki-laki atau perempuan mendapatkan posisi dalam setiap masalah politik. Laki-laki dan perempuan harus menerima kesempatan yang sama dalam sistem kapitalisme yang kompetitf. [90]

Dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran perempuan begitu komplek dan masih terkungkung dalam posisi sektor domestik,

[90] Mar Joire Hansen Shaevitz, *Wanita Super*, “terj”, Agus Susanto, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun perempuan tampil di depan publik, bekerja sebagai guru, dosen, politisi dan sebaginya perempuan juga masih mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga yang melakukan kegiatannya membersihkan rumah, memasak, tanpa ada bantuan dari pihak keluarga lain seperti suami dan anak. Menurut penulis tugas yang di berikan kepada perempuan seperti mengurusi rumah tangga bisa dilakukan dengan kerja sama antara suami, istri, dan anak. Tidak seharusnya semua pekerjaan rumah tangga dibebankan kepada perempuan atau seorang Ibu.

Seperti di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105 yang artinya: *"Dan katakanlah "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitujuga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"*.[91]

Menurut Hosein Muhammad ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya larangan bagi kaum perempuan untuk beraktivitas disektor publik. Sehingga, pada prinsipnya perempuan tidak dilarang bekerja atau beraktifitas di sektor publik, atau menunjukan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam beraktivitas. Komitmen Islam pada persoalan sosial dan ekonomi adalah jika aktifitas manusia laki-laki dan perempaun pada sektor publik sesuai dengan norma-norma dan moral etiknya.[92]

---

[91] Depag, *Al- Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 298.
[92] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK MENURUT SITI MUSDAH MULIA

A. Konsep Kepemimpinan Perempuan Menurut Siti Musdah Mulia

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai *rahmatan lil'alamin* (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas taqwanya, tanpa membedakan etnis dan jenis kelaminnya seperti yang ada di al-Qur'an Al-Hujurat ayat 13:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Yang artinya: " Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal".[93]

Al-Qur'an tidak menganut faham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic,* yang mengistimewakan suku tertentu. Setiap orang, tanpa dibedakan jenis kelamin dan suku bangsanya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi 'abid dan khalifah

[93]Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 847.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Q.S. An-nisa' 124 dan Q.S. An-Nahl 97).[94] Telah dijelaskan di dalam al-Qur'an, jika semua di anggap sama-sama mempunyai hak ketika ingin melakukan sesuatu kebaikan, tidak boleh ada diskriminasi di dalamnya mengenai suku, ras, dan jenis kelamin, semua mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan termasukdalamhal kepemimpinan.

Beribu-ribu tahun sebelumnya, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh, dan oleh sebab itu perempuan tidak berhak bersuara, berkarya, dan berharta, bahkan dianggap tidak memiliki dirinya sendiri. Islam secara bertahap mengembalikan hak- hak perempuan sebagai manusia merdeka. Perempuan berhak menyuarakan keyakinannya, berhak mengaktualisasikan karyanya, dan berhak memiliki harta, yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat.[95]

Beberapa sahabat perempuan di masa Rasulullah digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya, seperti prajurit perempuan yang bernama Asma binti Yazid al-Anshariyah serta istri nabi Aisyah dan Khadijah yang selalu mendampingi nabi, menjadi sahabat dan guru untuk umat muslim. Dalam al-Qur'an figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik seperti sosok figur Ratu Balqis yang mempunyai sebuah kerajaan *('arsyun 'azhim*) yang terdapat dalam al- Qur'an An Naml ayat 23:

---

[94] Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), 43.
[95] Ibid, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمۡرَأَةٗ تَمۡلِكُهُمۡ وَأُوتِيَتۡ مِن كُلِّ شَيۡءٖ وَلَهَا عَرۡشٌ عَظِيمٞ

Yang artinya " sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasanayang besar".

Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan "oposisi" terhadap berbagai permasalahan, dan menyampaikan kebenaran (Q.S. At-Taubah, ayat 71).:

وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

Yang artinya "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan rasulnya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah lagi Maha perkasa lagi maha bijaksana".

Namun, nilai-nilai Islam yang ideal dan luhur, ketika diaplikasikan dan berinteraksi dalam kehidupan umat manusia saat ini, sengaja atau tidak telah terjadi *distorsi*. Kebebasan dan kemandirian bagi perempuan yang di proklamirkan oleh Islam sering kali di salah pahami. Dalam realitas di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, kebebasan bergaul dengan lawan jenis dan eksploitasi tubuh untuk kepentingan seksual. Sehingga, yang banyak muncul dipermukaan adalah perempuan-perempuan yang memperlihatkan keindahan tubuhnya untuk kepentingan komersial dan menjadi objek kapitalisme, perempuan-perempuan yang merasa dirinya modern karena menggunakan produk yang bagus,baik dari segi pakaian, *accecoris*, maupun alat-alat yang sudah canggih, atau sebaliknya perempuan yang terkungkung di rumah karena menganggap keluar rumah merupakan suatu aib sehingga mereka tertinggal dalam segala hal, termasuk pendidikan, informasi, dan kemajuan teknologi.[96]

Menuju terciptanya masyarakat damai dan sejahtera *baldatun thayyibah wa rabun ghafur*, namun ketika pola relasi perempuan dan laki-laki ditarik dalam tatanan operasional yang bersifat praktis akan muncul perdebatan. Pengakuan pada wilayah normatif tidak berlanjut pada tatanan empirik dan operasional. Pada tatanan normatif disepakati bahwa perempuan diwajibkan menuntut ilmu, memperbanyak amal shaleh, dan berlomba melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, baik dalam kehidupan individual maupun dalam kehidupan sosial, di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kekuatan dan potensi kemampuan diri perempuan berkembang sebagai konsekuensi dari upaya peningkatan ilmu, aktivitas, dan kepedulian mereka dalam beramal dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar.* Sehingga, memberikan peluang untuk meraih kedudukan dan jabatantinggi di

[96] Ibid, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, seperti menjabat sebagai hakim, anggota parlemen, atau jabatan tertinggi sebagai kepala negara.[97]

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan dalam Islam tidak dibatasi ruang dan geraknya hanya pada sektor domestik di rumah tangga, melainkan di perbolehkan aktif di sektor publik, termasuk bidang IPTEK, ekonomi, sosial, ketenaga kerjaan, HAM, dan politik. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa keaktifan perempuan itu tidak sampai lupa dan mengingkari kodratnya sebagai perempuan di mana berhak menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya dengan wajar, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya. Hal yang lebih penting lagi yaitu bahwa keaktifan perempuan tersebut tidak menjerumuskan dirinya ke luarbatas-batas moral yang digariskan oleh agama.

Berbagai bentuk aktifitas perempuan harus selalu sejalan dengan norma-norma agama. Kebebasan yang diberikan oleh Islam bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang terkendali, yaitu terkendali oleh nilai-nilai akhlak mulia. Sehingga gerakan pemberdayaan perempuan hendaknya melahirkan banyak perempuan yang *shalehah*, yaitu perempuan yang berfikir maju, berwawasan inklusif, modern, aktif, dinamis, terdidik, dan mandiri, tetapi tetap memiliki *aqidah* yang benar, sopan- santun, rasa malu masih ternanam dalam dirinya, dan budi pekerti yang mulia.

Perempuan muslimah ideal adalah perempuan yang beriman, berakhlak mulia, berpendidikan, berwawasan inklusif, dan beramal saleh yang antara lain

[97] Siti Musdah Mulia Dan Anik Farida, *Perempuan Dan Politik*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujud dalam aktifitasnya membangun dan memberdayakan masyarakata untuk menuju terciptanya tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, atau baldatun *thayyibatun wa rabbun ghafur*.[98]

Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran sosial, sering kali peran sosial tersebut dibakukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada kesempatan bagi perempuan atau laki-laki untuk berganti peranan. Dalam tradisi jawa misalnya, pembakuan peran ini diungkapkan dalam pepatah "perempuan adalah *konco wingking*" dari laki-laki yang menjadi suaminya. Perempuan adalah teman hidup yang peranannya selalu di belakang. Pepatah tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa tugas-tugas perempuan adalah di belakang. Dalam budaya Jawa, istilah belakang tidak saja menunjuk arah tetapi bisa berarti sebuah ruangan yaitu dapur, yang letaknya di belakangdan tekesan tersembunyi dan disembunyikan (tidak kelihatan). Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam tradisi masyarakat sudah ada batasan peranan bagi perempuan.[99]

Perempuan dibatasi oleh dinding tebal rumah, dan lebih khususnya dapur. Sehingga sangat mudah bagi kita mengetahui kenapa banyak perempuan hanya tinggal di rumah, tidak bekerja, dan mereka mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk suami dan anak-anaknya. Hal tersebut disebabkan adanya budaya patriarkhi yang sangat kental terutama pada budaya Jawa. Hari-hari perempuan banyak dihabiskan untuk urusan dapur, mulai dari mengatur menu, berbelanja di pasar,

[98] Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, 47.
[99] Ibid, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasak, menghidangkan di meja makan, sampai membenahi kembali peralatan dapur yang sudah dipakai.

Bila ada perempuan yang mampu menembus dinding tebal tersebut, misalnya dengan menjadi "pekerja" sering perannya tidak dihargai. Penghasilan yang diperolehnya dari bekerja hanya di anggap sebagai penghasilan sampingan, meskipun jumlahnya lebih besar daripada suaminya. Tidak sedikit kelompok perempuan yang masuk dalam kelompok ini sering merasa bersalah jika tugas-tugas rumah tangga tidak terselesaikan akibat kesibukannya di luar rumah, walaupun kesibukannya itu justru untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga, perempuan pekerja memiliki beban yang lebih berat, di satu sisi perempuan harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangga, di sisi lain perempuan harus bertanggung jawab atas pekerjaan di kantornya. Sehingga dapat disimpulkan perempuan yang bekerja memiliki dua pemimpin sekaligus yaitu suami di rumah dan atasannya di kantor. Tidak demikian halnya dengan suami, itulah yang kita sebut dengan adanya ketimpangan gender.[100]

Perempuan dapat menekuni aktivitasnya di ruang publik dengan baik, kerja domestik di rumah tangga yang hendaknya di bagi secara sukarela bersama laki-laki. Ayah dan Ibu membuat kesepakatan bersama tentang pengelolaan tugas-tugas di rumah tangga, misalnya anak laki-laki dan perempuan mendapatkan tugas yang sama dan proporsional sehingga beban di rumah tangga dapat dikerjakan bersama-sama. Demikian juga dengan anggota keluarga lainnyalaki-laki dan

[100] Ibid, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan hendaknya mengerti tugas masing-masing sehingga tidak ada satu pihak memikul beban yang banyak sementara pihak lain tidak bekerja.

Menurut Musda Mulia "tidak perlu ada pembagian kerja domestik secara kaku, misalnya siapa harus melakukan apa, tetapi yang terpenting adanya saling pengertian antara laki-laki dan perempuan untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga sebagai tugas bersama. Semua pekerjaan di rumah tangga tidak ada yang spesifik untuk laki-laki atauhanya bisa dilakukan oleh perempuan. Laki-laki dan perempuan, keduanya dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan sama baik. Artinya siapa yang mempunyai kesempatan dialah yang mengerjakan, tanpa harus diperintahkan."[101]

Sehingga budaya segregasi kerja yang selama ini dipercayai masyarakat, yaitu bahwa tugas perempuan hanya mengurus rumah tangga dan laki-laki hanya mencari nafkah di luar rumah, dapat dieliminasi secara bertahap. Seperti pada pesan Al-Qur'an Ali-Imran ayat 3 yang artinya " sesungguhnya Allah swt tidak menyia-nyiakan aktivitas orang-orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan".

Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa budaya patriarki seharusnya bisa dieliminasi secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak argumen-argumen yang mendukung perempuan untuk bisa tampil di ruang publik misalnya al-Qur'an surat Ali- Imran ayat 3 diatas, bahwa Allah tidak menyia-nyiakan usaha dari setiap hambanya baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan diusahakan untuk bisa tampil di sektor publik misalnya bekerja, namun seharusnya perempuan juga tidak dibebankan masalah rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, dan menyiapkan

[101] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan keluarga. Penulis setuju dengan pendapat Musdah Mulia jika masalah rumah tangga tidak hanya dibebankan hanya kepada perempuan namun, dikerjakan bersama-sama oleh suami, Istri, dan anak. Sehingga keluarga bisa melakukan aktifitas rumah tangga dengan baik karena dikerjakan secara bersama-sama, tanpa harus ada beban dibenak suami, istri, atau anak.

Sedangkan pemikiran Musdah Mulia mengenai "penghasilan seorang istri yang bekerja juga dimaksudkan sebagai mencari nafkah untuk keluarga" penulis kurang setuju karena menurut analisa penulis, penghasilan seorang istri ketika bekerja memang hasilnya untuk digunakan perempuan atau istri sendiri, karena yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah kewajiban seorang suami, jika ekonomi keluarga sedang dalam masalah, penghasilan istri bisa digunakan untuk membantu kebutuhan keluarga jika istri berkenan, dan kebanyakan istripun akan melakukan hal tersebut.

Adanya pemikiran Musdah Mulia yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Musdah Mulia mengenai kepemimpinan perempuan hampir sama dengan pemikiran seorang feminis pada tahun 1994, yaitu Fatima Mernissi.[102]Fatima Mernissi dikaitakan dengan gerakan gender, arah

[102] Fatimah Mernissi adalah seorang pejuang feminis, lahir di sebuah harem di kota Fez, atau dalam istilah lain Qarawwiyan pada tahun 1940. Fatima Mernissi menyelesaikan pendidikannya di sekolah khusus perempuan, dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammad V di Rabat Maroko sampai selsai dan mengambil jurusan dalam bidang politik, sedangkan gelar doktoral (Ph.D) diperoleh dari Universitas Brandels, Amerika Serikat pada tahun 1973 di bidang sosiologi. Setelah dari Amerikat Serikat untuk menyelesaikan gelar doktornya, Fatima Mernissi kembali ke Maroko untuk menjadi dosen di Universitas Rabat Muhammad V, di bidang sosiologi dan tercatat sebagai dosen tamu di Universitas Calivornia Berkeley dan Harvard. Jabatan lain yang pernah dipegang oleh Fatima Mernissi adalah sebagai konsultan United Nations Agencies dan aktif dalam gerakan Pan Arab Women Solidarity Asosiation, sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang perjuangan hak-hak perempuan dikawasan dunia Arab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari gerakan gender Fatima Mernissi adalah mengupayakan sistem masyarakat yang menjamin status perempuan menjadi lebih baik, memiliki hak- hak yang seimbang dalam keluarga dan masyarakat serta mengupayakan peran perempuan ke arah yang lebih berarti dalam kehidupan misalnya dalam hal pendidikan, pekerjaan, mengemukakan pendapat, berbicara di depan umum, menjadi pemimpin dan kesempatan profesional lainnya. Hal tersebut sama dengan project yang ditawarkan oleh para feminis lainnya, namun yang membedakan Fatima Mernissi adalah berjuang untuk menyadarkan masyarakat dalam memaknai teks agama yang lebih kontekstual dan reinterpretasi, sama halnya dengan yang dilakukan oleh Musdah Mulia pada zaman modern ini.[103]

Menurut Fatima Mernissi hak perempuan dalam kepemimpinan pada dasarnya merupakan bagian kecil dari hak-hak politik yang harus dimiliki oleh setiap manusia.[104] Sabagaimana hak mengungkapkan diri dalam masyarkat umum, hak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya, hak dalam mendapatkan perlindungan dari negara, hak mendapatkan perlakuan adil di dalam hukum dan hak-hak lainnya, yang semuanya itu berada dalam lingkup hak asasi manusia. Menurut Fatima Mernissi persoalan kepemimpinan perempuan seharusnya dikembalikan pada persoalan prinsip agama yaitu kesetaraan dan keadilan. Karena pada dasarnya kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing individu laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama

---

(lihat) Abdul Wahid, "Eksistensi Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemikiran Gender Fatima Mernissi, *Jurnal Pelopor Pendidikan*, Vol 7, No 2, (Juni 2015), 156.

[103] A Khoduri Sholeh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 127.

[104] Fatima Mernissi dan Rifat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Perempuan dan Laki-laki Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, "terj", Tim Lembaga Studi Perempuan dan Pengembangan Anak, (Yogyakarta: LSPPA, 1996), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melakukannya. Sehingga tidak ada ruang untuk melegitimasi dan menutup ruang gerak perempuan untuk tetap eksis dalam ruang kepemimpinan.[105]

Menurut penulis adanya persamaan pemikiran antara Musdah Mulia dan Fatima Mernissi terletak pada bagaimana kedua tokoh feminis ini, menyuarakan untuk menghargai setiap kemampuan individu laki-laki dan perempuan dalam hal memimpin misalnya, tidak ada diskriminasi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena dalam agama Islam sangat jelas di dalam surat Al-Qur'an Ali-Imran ayat 3 yang artinya "sesungguhnya Allah swt tidak menyia-nyiakan aktivitas orang-orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan", setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan akan diberikan penilaian kebaikan oleh Allah Swt, dan tidak adadi dalam Al-Qur'an yang menyatakan pengecualian terhadap perempuan, agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*, yang memberikan kebaikan kepada semua makhluk tanpa adanya diskriminasi terhadap makhluk yang lain. Sedangkan perbedaan dari Musdah Mulia dan Fatima Mernissi yaitu terletak pada latar belakang historis dan geografis.

B. Perempuan Dalam Politik Menurut Siti Musdah Mulia

Gender and Development (Gender dan pembangunan) adalah sebuah konsep pembangunan yang di dasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki secara bersama mulai dari tahap pengambilan keputusan atau perumusan progam, tahap pelaksanaan, tahap

[105] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

evaluasi, sampai pada tahap menikmati hasil progam. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap progam pembangunan memenuhi aspirasi dan kepentingan keduanya. Setiap progam pembangunan memberikan manfaat yang sama kepada keduanya yaitu laki-laki dan perempuan.[106]

Konsep GAD (Gender dan pembangunan) muncul sekitar tahun 1990 sebagai respon terhadap konsep WID (*Women in Development*) atau perempuan dalam pembangunan yang dinilai kurang berhasil. Salah satu indikator ketidak berhasilan konsep WID adalah bahwa konsep tersebut dalam realisasinya gagal menyertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan umumnya hanya dilibatkan di tingkat pelaksana, belum sampai di tingkat perumus kebijakan atau pengambil keputusan. Hasilnya, tidak banyak perempuan yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Konsep ini di dasarkan pada asumsi bahwa gender adalah hasil konstruksi sosial (*socially constructed*), yang artinya bukan sesuatu yang bersifat mutlak. Konstruksi gender terbentuk oleh nilai-nilai tradisi, budaya, hasil pendidikan, terutama pendidikan dalam keluarga, pola asuh, ajaran agama, dan struktur masyarakat. Sebagai hasil konstruksi sosial, sehingga peran-peran gender dapat berubah. Peran-peran gender bagi laki-laki dan perempuan tidak bersifat mutlak, melainkan dapat ditukar. Peran publik dapat dilakukan oleh kaum perempuan dengan profesional. Dengan demikian gender perempuandan laki-laki dapat dikontruksikan untuk keduanya dapat mengelola tugas-tugas publik dan privat dengan sama baiknya. Perempuan dan laki-laki sama dapat menjalankan peran domestik dan publik dengan baik dan profesional.

---

[106] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, (Yogyakarta: Kibar press, 2008), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Musdah Mulia “hak berpolitik bagi setiap manusia, termasuk perempuan merupakan salah satu hak yang asasi. Pada prinsipnya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk yang muliadan bermartabat”. Hak asasi tersebut merupakan sebuah anugerah dari Tuhan kepada hamba-Nya. Tidak satu pun yang dapat merenggut, membatasi dan mengingkari eksistensi hak tersebut dengan berbagaialasan. Hak tersebut dibawa oleh manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak tersebut merupakan tanggung jawab pertama pemerintah.

Hak asasi manusia di dasarkan pada prinsip dasar bahwa setiap manusia adalah makhluk berharga yang harus dihormati dan dimuliakan. Setiap manusia mempunyai martabat kemanusiaan hakiki tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usulkebangsaan, umur, agama, atau keyakinan politik, setiap manusia berhak untuk menikmati hak mereka. Sebagai manusia yang utuh, perempuan punya hak asasi manusia seperti laki-laki. Realitas selama ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan lebih banyak di eksploitasi dan diabaiakan. Oleh karena itu, konferensi dunia tentang hak asasi manusia kaum perempuan dan kewajiaban negara untuk melindungi dan memajukan hak-hak tersebut, temasuk hak untuk bebas dari kekerasan.[107]

Menurut Musdah Mulia, “perilaku politik mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif”. Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan agresif sebagai

[107] Ibid, 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan, atau dapat disimpulkan perempuan yang mempunyai sifat tersebut dinilaisebagai perempuan dengan karakter bukan tipe perempuan ideal.

Dunia politik identik dengan dunia kepemimpinan, berada dalam posisi sebagai pemimpin perempuan mengalami lebih banyak hambatan dari pada laki-laki. Perempuan harus selalu membuktikan bahwa dirinya memang pantas dan bisa diandalkan. Musdah Mulia mengutip percakapan walikota perempuan pertama di San Fransisco“ Aku kerap dikritik atas beberapa komentar yang agak menyinggung perasaan yang selanjutnya meledak menjadi pergunjingan publik. Tidak sebagaimana laki-laki dalam posisi yang sama, semua pernyataan mereka sering kali berlalu tanpa tantangan.” Artinya, sejumlah kendala primodial masih menghadang kaum perempuan dalam berkiprah di dunia politik.

Pengalaman perempuan membuktikan bahwa kunci keberhasilan perempuan dalam jabatan pemerintah adalah menjadi orang yang bisa diandalkan. Artinya, mampu memberi perintah yang jelas dan sangat tanggap menindak lanjuti, memeriksa kembali setiap pernyataan demi keakuratan, menjaga integritas pribadi, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, tetap dituntut untuk bisa bekerja sama dalam satu kelompok dan membina hubungan dengan kolega yang didasarkan pada integritas dan rasa hormat. Perempuan harus mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan padanya dan harus menjadi pemimpin dalam arti yang sesungguhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada tiga unsur yang merajut kepemimpian dalam diri seseorang yaitu kekuasaan, kompetensi diri, dan agresi kreatif. Kekuasaan sebagai unsur paling penting dalam membangun kemampuan memimpin seseorang selalu didefinisikan dengan kekuatan atau ketegaran atau kemampuan bertindak yang diperlukan untuk mencapai sesuatu demi tujuan yang lebih besar, dan masyarakat tidak mempersiapakan perempuan membangun kualitas kekuasaan dalam diri mereka. Seperti, anak perempuan bisa bermimpi menjadi pemimpin bila mereka tidak memiliki gambaran kultural yang dapat membimbing mereka. Sehingga tidak heran jika kebanyakan perempuan mengalami kesulitan membebaskan diri dari pengaruh kultural untuk berkiprah dalam dunia kekuasaan, seperti menjadi politisi. [108]

Berdasarkan pengalaman Musdah Mulia ketika menjadi seorang pejabat, kekuasaan menurut perempuan adalah mencakup kemampuan menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat sesuai hakikat keperempuanan sebagai pengasuh dan pemelihara. Sehingga dapat disimpulkan definisi baru dari kekuasaan merupakan gabungan dari ciri-ciri maskulin dan feminin yang bisa dicapai oleh laki-laki maupun perempuan. Perlunya sosialisasi pengertian baru dari kekuasaan yang tidak selamanya bernuansa maskulin sehingga perempuan tidak harus mengeliminasi unsur-unsur feminitasnya untuk mencapai kekuasaan. Perempuan tidak harus menolak gaya feminin dan berperilaku sebagai laki-laki untuk berkuasa dan dianggap sebagai pemimpin. Sesungguhnya perempuan ketika berada di rumah tangga lebih banyak menjalankan peran kekuasaan, karena Ibu

[108] Ibid, 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah figur yang sangat berkuasa di rumah tangga. Ibu menggunakan kekuasaan yang nyata dalam peranannya sebagai pengatur keluarga. Pengalaman di rumah tangga dapat dijadikan referensi untuk menjalankan kekuasaan di lingkungan yang lebih besar dan rumit seperti negara. Bagi perempuan kekuasaan itu lebih dimaknai dengan keinginan mensejahtekan orang lain. Sumber kekuasaan bagi seorang pemimpin tidak berbeda dari sumber kekuasaan seorang Ibu yang membimbing keluarganya.[109]

Sudah waktunya dikembangkan suatu konsep mengenai kekuasaan perempuan (*women power*) yang berbeda dengan kekuasaan laki-laki yang selama ini menjadi acuan semua pihak. Kekuasaan dalamkonsep feminin adalah kekuasaan yang penuh dilimpahi kasih sayang. Kekuasaan semacam ini tidak berpusat pada diri sendiri melainkan lebih diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga, *women power* mengintegrasikan kualitas perempuan dengan beberapa karakteristik laki-laki dan kedua atribut itu mempunyai nilai yang sama. Sehingga, kualitas laki-laki dan kualitas perempuan tidak bertentangan, karena dalam kelembutan dan kasih sayang justru terpendam kekuatan yang besar.[110]

Kekuasaaan perempuan juga mencakup gagasan memberdayakan orang lain, bukan merusak orang lain. Sebaliknya, gagasan kekuasaan untuk berkuasa seseorang harus rela melawan orang lain. Kekuasaan hendaknya dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Jabatan, hendaknya ditafsirkan sebagai sarana untuk memberdayakan orang lain, bukan

[109] Ibid.
[110] Ibid, 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperdayakan. Demikian juga kekuasaan perempuan yang mencakup nalar, tujuan, agenda yang hendak dicapai. Musdah Mulia mengutip dari pandangan Sidney Verba dari Universitas Harvard bahwa sumbangan terpenting dari perempuan di dunia politik adalah mereka lebih berminat mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas dari pada memperluas lingkup kekuasaan mereka sendiri. Dengan mengembangkan definisi kekuasaan yang berbasis pengalaman perempuan, perempuan dapat menjadi politisi yang handal. Politisi yang tidak akan menyakiti hati lawan politiknya. Politisi yang tidak akan menggunakan intrik politik sebagaimana biasa digunakan oleh laki-laki. Seorang politisi perempuan dapat mengasah sifat ke ibuannya yang selalu tanggap terhadap kebutuhan orag lain untuk menyelesaikan setiap agenda politiknya.[111]

Dapat disimpulkan oleh penulis dari penjelasan di atas bahwa perempuan tidak lagi terkungkung oleh batasan dinding tebal yang menghalanginya untuk bisa menunjukkan potensi kecerdasan yang ada dalam dirinya. Beberapa lembaga seperti GAD (*Gender And Development*) dan WID (*Women And Development*) mendukung untuk bisa menyuarakan aspirasi perempuan ke ruang publik misalnya dalam pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan di dalam pemerintahan seperti perpolitikkan. Ketika perempuan menjadi seorang pejabat dan duduk di kanca perpolitikan, perempuan akan menjalankan amanahnya sebagai pejabat dengan sangat baik. Seperti pendapat Musdah Mulia bahwa "ketika perempuan menjabat maka perempuan akan melakukan agenda-agenda politiknnya dengan sangat baik, pejabat perempuan ketika menjabat memiliki

[111] Ibid, 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecenderungan untuk memberdayakan masyarakat bukan memperdayakan jabatannya sebagi wakil dari rakyat".[112] Sifat ini muncul karena perempuan sudah terbiasa untuk mengatur tatanan yang ada di dalam keluarga, sebagai seorang Ibu yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sehingga, sifat feminitas lemah lembut yang ada dalam diri perempuan tidak selalu dilihat sebagai kelemahan, namun politik yang kental dengan sifat maskulinitas yaitu sifat yang tegas, bijaksana, dan saling menjatuhkan sebaiknya juga harus dikombinasi dengan sifat feminitas supaya perpolitikkan memang benar-benar mengabdi kepada masyarakat, bukan egois untuk memperbesar kekuasaan politiknya.

Sedangkan menurut Fatima Mernissi, pembelengguan hak-hak politik perempuan dalam wilayah kecil misalnya dalam rumah tangga disebabkan karena adanya doktrin-doktrin penguasa atau khalifah, seperti pada bukunya "Islam dan Demokrasi", bahwa:

"dalam pada itu para imam yang telah memproklamasikan selam beberapa abad bahwa ketaatan pernikahan merupakan kewajiban menggerutu. Mentaati suami berarti mentaati Tuhan. Kata- kata taat yang muncul dalam undang-undang sipil memproduksi kembali ketaatan buta pada khalifah yang ada di dalam harem, para imam berang karena jika ketaatan di dalam rumah ditentang oleh perempuan yang lemah, bagaimana laki-laki bisa diharapkan merendahkan mata mereka untuk menghormati pemimpin ?"[113]

---

[112] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), 122.
[113] Fatima Mernissi, *Islam Dan Demokrasi, Antologi Ketakutan*, "terj", Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatimah Mernissi mengajukan tiga kriteria dalam hubungannya dengan peran dan partisipasi perempuan. Pertama, ketika zaman Rasulullah, kaum perempuan telah diakui sebagai sahabat. Kedua, kaum perempuan juga mengambil sumpah bai'at langsung kepada Rasulullah untuk memperjuangkan Islam. Ketiga, banyak sumbangan perempuan dalam proses penulisan hadis, karena itu Fatima Mernissi menyatakan bahwa kepasifan perempuan, pemingitan dan kedudukannya yang marginal adalah suatu konstruksi dan rekayasa yang dibudayakan, tidak ada hubungannya dengan tradisi apalagi ajaran Islam.[114] Dapat disimpulkan bahwa antara Musdah Mulia dan Fatima Mernissi sangat mendukung perempuan untuk bisa menjadi pemimpin jika perempuan mempunyai keahlian tersebut, menurut UUD di Indonesia yang telah dipaparkan oleh penguatan pendapat Musdah Mulia dan pendapat Fatima Mernissi yang merujuk pada histori pada zaman Rasul, para perempuan juga diakui keahliannya dalam membela Islam, jadi tidak ada alasan yang tepat untuk tidak memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin dan berjuang di dalam perpolitikan, dengan demikian penulis sangta setuju dengan adanya pendapat Musdah Mulia.

C. Realitas Peran Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia

Dengan kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki perempuan, perempuan tidak hanya bisa mengurus rumah tangga atau istri yang bergerak di wilayah domestik, namun potensi yang dimilikinya harus dikembangkan. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki sama baik kecerdasan otaknya, kemuliaan, cita-cita,

[114]Fatima Mernissi dan Rifat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Perempuan dan Laki-laki Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, "terj", 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilikiimpian dan harapan,kekhawatiran dan ketakutan, begitu juga dengan potensi untuk memimpin.[115]

Peran politik perempuan dapat dimaknai dengan seperangkat harapan yang ditujukan pada kaum perempuan yang berkiprah di bidang politik atau organisasi poltik, atau di lembaga-lembaga politik lainnya. Peraturan perundang- undangan di Indonesia, secara formal tidak memuat hal- hal yang bersifat diskriminatif gender. Secara normatif tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalkan pada UUD 1945 pasal 27, menyatakan "bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum". Dengan demikian perempuan dan laki-laki memiliki persamaan hak hukum dalam semua bidang kehidupan, termasuk persamaan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pada konteks kehidupan Internasional, Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian yang berkaitan dengan hak asasi perempuan. Di antaranya, tertuang dalam UU No 7 tahun 1984, yaitu perjanjian mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Disebut dengan istilah CEDAW (*convention on the elimination of all discrimination against women*), konvensi ini dihasilkan dalam sidang umum PBB tahun 1967.[116]

Dalam realitas politik saat ini, masih banyak ditemukan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Perempuan adalah mayoritas (51,2 %) penduduk Indonesia. Pada pemilu 2004 perempuan juga mayoritas (57%) dari pemilih atau *voters*. Namun, dapat dilihat di setiap institusi politik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, perempuan selalu minoritas atau marginal

[115] Melly G. Tan, *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Kowani, 1978), 34.
[116] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlibatannya dalam bidang tersebut. Realitas ini masih berlanjut dari periode sebelumnya. Perempuan merupakan mayoritas pemilih atau voters pada seluruh pemilu yang diselenggarakan pemerintah orde baru, namun tetap merupakan minoritas dalam parlemen. Sebagai contoh menurut Musdah Mulia pada pemilu tahun 1997, keterlibatannya sebanyak 55% pemilih, namun keterwakilannya di parlemen hanya 9%. Artinya, dalam bidang politik posisi perempuan masih inferior, marginal belum diperhitungkan sebagai subyek.[117]

Menurut Musdah Mulia, dampak dari rendahnya keterwakilan posisi perempuan di pusat pengambilan keputusan dapat dilihat dari isu-isu yang menjadi perhatian pemerintah. Seperti, isu-isu perempuan, pentingnya air bersih, lingkungan sehat, ketersediaan bahan pangan yang murah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering sekali tidak mendapatkan perhatian penting di dalam perdebatan-perdebatan politik yang aktual.

Kebijakan-kebijakan politik di masa orde baru juga sangat menyudutkan perempuan. Sebagai contohnya proyek keluarga berencana, penangganan mengenai akses-akses negatifnya kurang mendapat perhatian, sementara peserta KB mayoritas perempuan. Musdah Mulia mengutip dari Notosusanto dan Purwandari " mengatakan bahwa pihak pemberi jasa (provider) KB lebih banyak memberikan informasi tentang kelebihan suatu alat KB, sementara tentang kekurangan dan efek sampingnya tidak diberitahukan".[118]

---

[117] Ibid.
[118] Notosusanto dan Purwandari, E. Kristi, *perempuan dan pemberdayaan*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita UI, 1997), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga tidak heran kelompok perempuan menyuarakan kepedulian terhadap isu-isu perempuan seperti, kekerasan domestik (*domestic violence*) atau kekerasan negara (*state violence*), hak reproduksi, kesehatan anak, dan kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminatif gender tidak mendapat respon positif, karena perempuan tidak banyak terlibat dalam institusi politik formal. Sistem politikseperti; idologi, bentuk, struktur,kekuasaan, kapasitas mobilisasi memperlihatkan adanya pengucilan dan marginalisasi perempuan di dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik.[119]

Implikasi dari kurangnya perempuan mendapat akses dalam keseluruhan tahap pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan , serta akses untuk menikmati hasil pembangunan. Di era otonomi daerah sekarang, kondisi ini menyebabkan sejumlah kebijakan publik, termasuk APBD, tidak menyentuh kebutuhan pokok perempuan, sejumlah jaminan perlindungan HAM, keamanan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan lingkungan hidup sehingga pada akhirnya membawa kepada rendahnya kualitas hidup perempuan. Adanya beberapa faktor yang disebabkan rendahnya keterwakilan perempuan, ada *pertama*, bersifat eksternal dan *kedua* internal yaitu; Faktor eksternal seperti : partai politik yang masih memiliki pandangan yang rendah terhadap perempuan dan masalah perempuan artinya tidak sensitif gender, partai politik belum intensif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan, partai politik masih memiliki mekanisme pembinaan kader yang memihak kepada laki-laki, partai politik masih didominasi

[119] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran laki-laki (*male domain*), partai politik masih memperlakukan perempuan tidak lebih sebagai objek atau alat mobilisasi massa, aturan yang melarang anggota dan pengurus partai politik direkrut dari PNS, sementara banyak perempuan yang pandai sudah menjadi PNS, dan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi mengakibatkan garis *start* yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Sementara yang merupakan faktor internal seperti; kurang percaya diri pada perempuan (*self confidence*) karena kemampuan mereka memang terbatas, adanya tidak memanfaatkan peluang, tidak mendapatkan dukungan baik dari keluarga maupun masyarakat, adanya belenggu stereotip sebagai penjaga ranah domestik, adanya kungkungan dalam tradisi misioginis, dan perempuan masih dibatasi oleh pemahaman dan penafsiran agama yang biasnilai-nilai patriarki dan bias gender.[120]

Memperhatikan kondisi obyektif perempuan yang tertinggal karena nilai-nilai budaya patriarki dan perlakuan diskriminatif, maka pemberdayaan perempuan dalam politik hendaknya dimulai dengan kegiatan-kegiatan penyadaran (*awareness rising*), terutama mengubah cara pandang dan pola pikir (*mind setting*), seluruh masyarakat laki-laki dan perempuan tentang prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi, hukum dan keadilan.[121]

---

[120] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan,* 286.
[121] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan dia atas penulis dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia masih sangat kecil. Pihak dari pemerintah telah menyetujui jika perempuan harus ikut terlibat dalam memajukan negara seperti politik. Seperti dalamUUD 1945 pasal 27, menyatakan "bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum", dan UU No 7 tahun 1984, yaitu perjanjian mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, namun perempuan juga tetap enggan untuk bisa berpartisipasi dalam politik ada beberapa faktor yang bisa dilihat seperti adanya kurang rasa percaya diri pada perempuan untuk tampil di depan publik dan memperlihatkan potensi yang dimilikinya, tidak adanya dukungan dari pihak keluarga dan faktor yang terkahir disinyalir adanya ketimpangan gender dan beberapa partai politik tidak menyakini dengan potensi yang dimiliki oleh perempuan.

Jika ada perempuan yang maju dalam bidang perpolitikkan, kondisi tersebut juga sangat sulit karena perempuan hanya diletakkan dalam sistem pelaksana bukan sistem perencana maupun pengambil kebijakan. Padahal beberapa kebijakan seperti permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kebijakan penggunaan KB, pemberdayaan perempuan, semua itu adalah permasalahan perempuan yang merugikan dan sangat sering terjadi seharusnya pejabat/ perempuan yang masuk dalam perpolitikkan bisa ikut serta untuk mengambil kebijakan dalam permasalahan tersebut, karena secara psikologis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan akan tahu bagaiamana cara untuk mengatasi hal tersebut karena sesama perempuan mengerti keadaan perempuan lain secara emosional.[122]

Dari pemaparan analisis di atas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa budaya patriarkhi seharusnya dihilangkan meskipun sangat sulit, minimal budaya tersebut harus dieliminasi secara bertahap. Pada zaman modern ini, berkembangnya teknologi informasi dan pendidikan, yang seharusnya berdampak pada pola pemikiran masyarakatnya, yang artinya tidak akan sulit untuk memahami untuk menghilangkan budaya patriarkhi. Setelah budaya patriarkhi dihilangkan maka tidak ada diskriminasi pada suatu kelompok misalkan perempuan. Sehingga tercipta kesetaraan, laki-laki dan perempuan bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya misalkan dalam hal memimpin tanpa ada pembatasan, karena setiap manusia memiliki hak untuk memajukan negaranya.

[122] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan di atas, terdapat beberapa penjelasan yang dapat disimpulkan oleh penulis diantaranya:

1. Menurut Musdah Mulia perempuan adalah makhluk sosial yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti bermasyarakat, melakukan kerja di luar rumah, melakukan pekerjaan di dalam rumah sebagai Ibu, dan melakukan kegiatan berpolitik sebagai tugas warga negara. Konsep kepemimpinan perempuan menurut Musad Mulia adalah bahwa perempuan muslimah ideal adalah perempuan yang beriman, berakhlak mulia, berpendidikan, berwawasan inklusif, dan beramal saleh yang antara lain terwujud dalam aktifitasnya membangun dan memberdayakan masyarakata untuk menuju terciptanya tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, atau baldatun *thayyibatun wa rabbun ghafur*.

2. Sedangkan perempuan dalam berpolitik menurut Musdah Mulia adalah bahwa "hak berpolitik bagi setiap manusia, termasuk perempuan merupakan salah satu hak yang asasi. Pada prinsipnya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk yang mulia dan bermartabat". Ketika perempuan menjadi seorang yang duduk di perpolitikkan maka, kekuasaan menurut perempuan adalah mencakup kemampuan menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat sesuai hakikat keperempuanan sebagai pengasuh dan pemelihara. Sehingga dapat disimpulkan definisi baru dari kekuasaan merupakan gabungan dari ciri-ciri maskulin dan feminin yang bisa dicapai oleh laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun perempuan. Adanya pemikiran mengenai kepemimpinan perempuan Musdah Mulia sama dengan pemikiran Fatima Mernissi, yang menyebutkan bahwa hak perempuan dalam kepemimpinan pada dasarnya merupakan bagian kecil dari hak-hak politik yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Adanya banyak perbincangan mengenai kepemimpinan perempuan, menurut Fatima Mernissi sebaiknya dikembalikan kepada agama yaitu mengenai kesetaraan dan keadilan, dengan demikian antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menjadi pemimpin. Persamaan pemikiran yang dimiliki oleh Musdah Mulia dan Fatima Mernissi teletak pada, mereka sama dalam menyuarakan untuk menghargai setiap kemampuan individu laki-laki dan perempuan dalam hal memimpin misalnya, tidak ada diskriminasi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Adanya persamaan dari kedua tokoh, juga terdapat sedikit perbedaan diantaranya yaitu terletak pada latar belakang historis dan geografis, pendekatan yang digunakan juga berbeda, jika Musdah mulia menggunakan pendekatan sosio, historis, dan hukum sedangkan Fatima Mernissi menggunakan kacamata historis yang melihat langsung dari Al-Qur'an.

B. Saran

Setelah melalui proses penelitian yang panjang sebagaimana terpaparkan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan penulis akan memberikan rekomendasi lanjutan untuk penelitian skripsi, yaitu:

1. Dalam penelitian mengenai kepemimpinan perempuan bagi pembaca pada umumnya, hendaknya penulisan skripsi ini dapat menjadi rujukan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan perempuan berpolitik menurut Siti Musdah Mulia.

2. Dalam penelitian skripsi ini hendaknya, pembaca dapat memahami konsep kepemimpinan perempuan dengan baik. Sehingga, politik yang baik adalah memiliki kedua sikap yaitu, maskulin dan feminin. Untuk lebih lanjut, penelitian ini bisa diteruskan oleh para peneliti yang ingin meneliti mengenai Siti Musdah Mulia dari sisi konsep yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Rujukan Buku

Ansohori, Dadang S., Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik, Bantahan Tuntas Terhadap Sekulerisme dan Liberalisme*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar 2008.

Arivia, Gadis, Feminisme Sebuah Kata Hati, Jakarta: Buku Kompas, 2006.

Ar- Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah: ringkasan tafsir Ibnu Katsir I*, terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bekker, Anton dan Achmad Charuz Zubair , Metodologi Penelitian Filsafat, Yogyakarta: Karsinus, 1990.

Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.

E. Kristi, Purwandari dan Notosusanto, *perempuan dan pemberdayaan*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita UI, 1997.

Hassan, Rifat dan Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Perempuan dan Laki-laki Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim Lembaga Studi Perempuan dan Pengembangan Anak, Yogyakarta: LSPPA, 1996.

Kadarusman, Agama, Relasi Gender dan Feminisme, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Kris Budiman, *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Lubis, Akhyar Yusuf, *Pemikiran Kritis Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Madjid, Nurcholis, Masyarakat Religius, Jakarta: Paramadina, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Mernissi, Fatima, *Islam Dan Demokrasi, Antologi Ketakutan*, terj, Amiruddin, Yogyakarta: LKIS, 1992.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

_`_____, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

Mulia, Siti Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.

_____, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Megawati Institute, 2014.

_____, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Kibar Press, 2008.

_____, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

Mulia, Siti Musdah Dan Anik Farida, *Perempuan Dan Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Muslikhati, Siti, *Feminisme dan pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Nope, Marselina, *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*, Yogyakarta: Rasist Book, 2005.

Shaevitz, Mar Joire Hansen, *Wanita Super*, terj, Agus Susanto, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Shihab,Quraish, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.

_____, *Tafsir al- Misbah;Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Volume 15*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006.

_____, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.

Sholeh, A Khoduri, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sjadzali, Munawir, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.

_____, Islam *Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.

_____, *Hukum Islam DI Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT RemajaRosda Karya, 1991.

Soetrisno, Loekman, *Kemiskinan, Perempuan, & Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2012.

Tan, Melly G, *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, Jakarta: Kowani, 1978.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Prespektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

_____, *Rekonstruksi Pemahaman Gender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, Jakarta: el- Kahfi, 2002.

Sumber Rujukan Jurnal

Al Ayubi, Syaifuddin, "Konsep Dan Interpretasi Ayat-Ayat Gender Dalam Wacana Sosial Politik", *Jurnal Penelitian Keislaman*, vol 11. No 2, Juli 2015.

Muafiah, Evi, " Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam", *Cendikia*, Vol 3, No 2 Juli-Desember, 2005.

Mulia, Siti Musdah, " Menggagas Kurikulum yang Berperspektif Gender", *perta*, vol VI, No 1, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mutrofin, " Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffta Hassan, *Teosofi*, No 1, Juni, 2013.

Sahrah, Alimatus, "Persepsi Terhadap Kepemimpinan Perempuan" , *Anima*, Indonesian Psychological Journal, Vol 19, No 3, 2004.

Wahid, Abdul "Eksistensi Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemikiran Gender Fatima Mernissi, *Jurnal Pelopor Pendidikan*, Vol 7, No 2, Juni 2015.

Sumber Rujukan Online

Haikal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, www.pustakaonlineMediaisnet.com, diakses pada 22 Juni 2017.

KBBI, http://kbbi.web.id/konsep, diakses 1 April 2017.

M.Hidyatullah,AntonR,/berita/nasional/read/2015/11/20/83632/jumlah/pendduk.html, diakses pada 31/03/17.

Permana, Dany, *Ditahan KPK, Mantan Menkes Siti Fadilah Menahan Tangis*, Kompas.com, No 17051391, 24 Oktober 2016. (Berita Online), https://nasional.kompas.com.kpk.mantan.menkes.siti.fadilah.menahan.tangi. Diakses pada 29 Maret 2017.

Putri, Anindya Legia, *Kata Ahmad Dhani Soal Tato dan Rokok Menteri Susi*, Tempo, No 21/9619057, 03 November 2014. (Berita Online), https://m.tempo.co/read/news/2014/11/03/219619057/kata-ahmad-dhani-soal-tato-dan-rokok-menteri-susi. diakses pada 29 Maret 2017.

.Ulum, *Biografi Musdah Mulia: Dalam Buku Muslimah Sejati*, www.mujahidahmuslimah.com, diakses 26 April 2017.

Wawancara penulis dengan Musdah Mulia , melalui Email, pada 4 Febuari 2017.

Wijayanto, Ndaru , *Bangunan Warga Pamurbaya Akan Dibongkar Untuk Ruang Terbuka Hijau, Bagaimana Tanah Mereka ?*, Tribun Jatim.com, 23 Maret 2017. (Berita Online), http://jatim.tribunnews.com/2017/03/23/bangunan-warga-pamurbaya-akan-dibongkar-untuk-ruang-terbuka-hijau-bagaiman-tanah-mereka. diakses pada 29 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id